

LAPORAN
PENYUSUNAN

ANALISIS INDEKS KETIMPANGAN WILAYAH KOTA PALU

2023



**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PALU**

KATA PENGANTAR

Keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat laju pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Secara sederhana pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perubahan dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah dari tahun ke tahun. Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan yang berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Secara teoritis dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan suatu masyarakat, semakin baik tingkat kesejahteraannya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palu memerlukan data dan indikator statistik sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja terhadap implementasi pembangunan di daerah. Data dan indikator-indikator ekonomi dan sosial yang terpercaya dapat digunakan sebagai tolok ukur pencapaian target dan juga menjadi pijakan bagi perumusan rencana pembangunan yang akan datang, apalagi pengaruh yang ada dengan adanya pandemi Covid-19.

“Analisis Indeks Ketimpangan Wilayah Kota Palu Tahun 2023”, ini disusun hasil kerjasama BAPPEDA Kota Palu dengan Akademisi Universitas Tadulako, dan Badan Pusat Statistik Kota

Palu berisi analisis pertumbuhan ekonomi di Kota Palu pada tahun 2018-2023. Langkah ini sebagai upaya mendapatkan gambaran lebih rinci PDRB perkapita masyarakat di Kota Palu yang dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk merumuskan kebijakan pembangunan untuk menurunkan ketimpangan pembangunan di Kota Palu.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian analisis ini. Mudah-mudahan hasilnya dapat bermanfaat dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Palu.

Palu, November 2023
BAPPEDA Kota Palu
Kepala,

Drs. Arfan, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar	vii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Maksud dan Ruang Lingkup Analisis	5
1.3 Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
1.5 Referensi Hukum.....	8
Bab II Tinjauan Pustaka.....	10
2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi	11
2.2 Definisi Pembangunan.....	13
2.3 Pengertian dan Cakupan Wilayah	15
2.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional/Wilayah	17
2.5 Model Pertumbuhan Ekonomi Regional	19
2.5.1 Model Basis Ekspor (<i>Export-base Model</i>)	19
2.5.2 Model <i>Interregional Income</i>	20
2.5.3 Model Neo-klasik	20
2.5.4 Model Penyebab Berkumulatif (<i>Cumulative Causation Model</i>).....	21
2.6 Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah	21
2.7 Penyebab Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah....	23
2.8 Ukuran Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah	26
2.9 Analisis Potensi Perekonomian Wilayah.....	28
2.9.1 Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ)	28
2.9.2 <i>Shift Share</i>	29
2.9.3 Tipologi Klassen	30

Bab III Metode Penelitian.....	34
3.1 Sumber Data	35
3.2 Metode Analisis.....	35
3.2.1 <i>Location Quotient (LQ)</i>	35
3.2.2 <i>Shift Share (SS)</i>	37
3.2.3 Tipologi Klassen.....	38
3.2.4 Indeks Williamson.....	40
3.2.5 Indeks Entropi Theil.....	41
Bab IV Gambaran Umum Kota Palu	44
4.1 Keadaan Penduduk	45
4.2 Gambaran Data Indikator Makro Kota Palu.....	46
4.2.1 Perekonomian	46
4.2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	48
4.2.3 Kemiskinan	50
4.2.4 Tenaga Kerja.....	50
Bab V Hasil dan Pembahasan	52
5.1 Pertumbuhan Ekonomi	53
5.2 Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi Wilayah.....	57
5.2.1 <i>Location Quotient (LQ)</i>	57
5.2.2 <i>Shift Share (SS)</i>	72
5.2.3 Tipologi Klassen.....	83
5.3 Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan.....	87
5.3.1 <i>Indeks Williamson</i>	87
5.3.2 <i>Indeks Entropi Theil</i>	89
Bab VI Implikasi Kebijakan.....	91
6.1 Kesimpulan	92
6.2 Rekomendasi	95
Lampiran.....	104

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pengelompokan Pembangunan Wilayah Berdasarkan Tipologi Klassen	32
Tabel 3.1. Pengelompokan Pembangunan Wilayah Berdasarkan Tipologi Klassen.....	39
Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Kota Palu Tahun 2018 – 2022.....	45
Tabel 4.2. IPM Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2022	49
Tabel 4.3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Kota Palu Tahun 2018 – 2022	50
Tabel 4.4. Indikator Ketenagakerjaan Kota Palu Tahun 2018 – 2022	51
Tabel 5.1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu Tahun 2018 – 2022	53
Tabel 5.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan di Kota Palu Tahun 2018 – 2022 (%).....	54
Tabel 5.3. Distribusi PDRB ADHB Antar Kecamatan di Kota Palu Tahun 2018 – 2022 (Persen).....	55
Tabel 5.4. PDRB Perkapita (ADHB) Kecamatan di Kota Palu Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah)	56
Tabel 5.5. Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ) Kecamatan di Kota Palu Tahun 2018 – 2022	60
Tabel 5.6. Perhitungan Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu (N_{ij}) Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah)	73
Lanjutan	
Tabel 5.6. Perhitungan Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu (N_{ij}) Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah)	74
Tabel 5.7. Perhitungan <i>Proportional Shift</i> (M_{ij}) Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah).....	76
Lanjutan	
Tabel 5.7. Perhitungan <i>Proportional Shift</i> (M_{ij}) Tahun 2018 –	

	2022 (Juta Rupiah).....	77
Tabel 5.8.	Perhitungan Pergeseran Diferensial (C_{ij}) Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah).....	79
Lanjutan		
Tabel 5.8.	Perhitungan Pergeseran Diferensial (C_{ij}) Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah).....	80
Tabel 5.9.	Hasil Analisis <i>Shift Share</i> (D_{ij}) Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah).....	81
Lanjutan		
Tabel 5.9.	Hasil Analisis <i>Shift Share</i> (D_{ij}) Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah).....	82
Tabel 5.10.	Rekap Hasil Analisis <i>Shift Share</i> (N_{ij} , M_{ij} , C_{ij} , dan D_{ij}) untuk 3 (tiga) sektor/kategori nilai tertinggi Tahun 2018 – 2022	83
Tabel 5.11.	Kesimpulan Kriteria Kecamatan dari Rata-rata Laju Pertumbuhan dan Rata-rata PDRB Perkapita Tahun 2018 – 2022	86
Tabel 5.12.	Indeks Wiliamson. Indeks Entropi Theil, dan Indeks Gini Kota Palu Tahun 2018 – 2022	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.	Perkembangan IPM Kota Palu 2018 – 2022.....	48
Gambar 4.2.	Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2022	49
Gambar 5.1.	Sektor Basis Kecamatan Palu Barat Tahun 2018 – 2022.....	65
Gambar 5.2.	Sektor Basis Kecamatan Tatanga Tahun 2018 – 2022.....	66
Gambar 5.3.	Sektor Basis Kecamatan Ulujadi Tahun 2018 – 2022.....	67
Gambar 5.4.	Sektor Basis Kecamatan Palu Selatan Tahun 2018 – 2022.....	68
Gambar 5.5.	Sektor Basis Kecamatan Palu Timur Tahun 2018 – 2022.....	69
Gambar 5.6.	Sektor Basis Kecamatan Mantikulore Tahun 2018 – 2022.....	70
Gambar 5.7.	Sektor Basis Kecamatan Palu Utara Tahun 2018 – 2022.....	71
Gambar 5.8.	Sektor Basis Kecamatan Tawaeli Tahun 2018 – 2022.....	72
Gambar 5.9.	Tipologi Kecamatan di Kota Palu Tahun 2018 – 2022.....	84
Gambar 5.10.	Perkembangan Indeks Williamson Kota Palu Tahun 2018 – 2022	88
Gambar 5.11.	Perkembangan Indeks Entropi Theil di Kota Palu Tahun 2018 – 2022	90

TUJUAN ANALISIS INDEKS KETIMPANGAN WILAYAH KOTA PALU 2023

TUJUAN

1

Menganalisis pertumbuhan ekonomi
antar Kecamatan di Kota Palu

TUJUAN

2

Menganalisis sektor potensial
antar Kecamatan di Kota Palu



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesenjangan antarwilayah di Indonesia menjadi signifikan karena adanya keragaman potensi sumber daya alam, letak geografis, kualitas sumber daya manusia, ikatan etnis atau politik. Keberagaman ini dapat menjadi sebuah keunggulan dalam satu sisi, namun disisi lain dapat berpotensi menjadi sumber instabilitas sosial dan politik nasional. Untuk itu, maka penyelenggaraan pembangunan secara terencana dan berorientasi terhadap pengurangan kesenjangan antar wilayah menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pemahaman secara komprehensif terhadap persoalan kesenjangan tersebut perlu menjadi acuan dalam perumusan perencanaan pembangunan sehingga dapat mendukung upaya pemerataan pembangunan di Indonesia.

Ketidakseimbangan perekonomian antardaerah di Indonesia harus dianggap sebagai masalah serius dalam perekonomian nasional dan dalam masalah inilah seharusnya desentralisasi dapat memberikan kontribusi yang paling signifikan. Walaupun, desentralisasi juga berpotensi membuat disparitas semakin parah apabila tidak ada kebijakan khusus yang

memprioritaskan upaya mengurangi kesenjangan itu sendiri. Kesenjangan perekonomian antara daerah sendiri adalah gejala alamiah yang terjadi di hampir semua wilayah di dunia, termasuk di negara maju.

Meskipun tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, kesenjangan antar daerah tetap harus diupayakan untuk dikurangi. Salah satu prinsip dasar yang harus dipegang para pembuat kebijakan adalah bahwa kesenjangan perekonomian antar daerah masih dapat ditoleransi sejauh tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional dan tidak menciptakan ketidakmerataan pendapatan yang luar biasa dalam masyarakat. Dengan kata lain, upaya melakukan redistribusi pendapatan masyarakat haruslah mendapatkan prioritas utama dibandingkan redistribusi perekonomian daerah. Satu hal lagi yang harus dilakukan dalam upaya mengurangi kesenjangan perekonomian antar daerah adalah mengurangi jarak antara daerah terkaya dengan daerah termiskin melalui upaya khusus untuk mengangkat daerah termiskin secara signifikan. Untuk memberikan orientasi dalam upaya mengurangi kesenjangan tersebut, diperlukan data dan informasi objektif, serta teknik pengolahan data tertentu sehingga dapat memberikan gambaran adanya kesenjangan antarwilayah. Informasi yang dikembangkan dalam analisis kesenjangan ini mencakup dimensi internal dan eksternal. Dimensi internal memberikan gambaran tentang keadaan di

dalam tiap daerah, sedangkan dimensi eksternal menggambarkan posisi relatif keadaan daerah terhadap daerah lainnya. Dengan demikian, informasi ini mengandung sifat *benchmarking* sehingga kondisi atau kinerja tiap daerah dapat dibandingkan dengan daerah yang lain. Informasi tersebut juga diharapkan dapat menggambarkan corak keadaan tiap daerah atau kelompok daerah.

Monitoring dan evaluasi capaian berbagai hasil pembangunan saat ini menjadi pembahasan utama di berbagai wilayah. Pembahasan tersebut berawal dari pentingnya upaya menyinkronkan antara capaian indikator-indikator perekonomian dengan capaian tingkat kesejahteraan masyarakat. Evaluasi terhadap capaian pembangunan ekonomi yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat memberikan alternatif bagi setiap daerah untuk melakukan penyesuaian kebijakan pembangunan yang dilakukan. Hasil evaluasi kinerja pembangunan diharapkan mampu memberikan rekomendasi terkait perubahan pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi itu bukan tujuan akhir, tetapi hanya suatu alat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, setiap kreativitas kebijakan ekonomi diharapkan mampu memberikan pengaruh terhadap berbagai hal yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan distribusi. Hal ini juga untuk memastikan bahwa

pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh semua kalangan, terutama masyarakat dengan tingkat ekonomi golongan menengah ke bawah.

Pemerintah Kota Palu berupaya untuk mengurangi kesenjangan yang ada. Untuk memberikan orientasi dalam upaya mengurangi kesenjangan tersebut, diperlukan data dan informasi objektif, serta teknik pengolahan data tertentu sehingga dapat memberi gambaran adanya kesenjangan antarwilayah. Dengan adanya data tersebut, Pemerintah Kota Palu akan lebih mudah untuk menempatkan program atau melaksanakan kebijakan yang sesuai di masing-masing kecamatan, sehingga upaya mengurangi kesenjangan lebih mengarah dan tepat sasaran. Lebih lanjut juga diharapkan bisa diketahui potensi yang ada di masing-masing kecamatan yang ada di Kota Palu.

Penyusun Buku Analisis Indeks Ketimpangan Wilayah Kota Palu Tahun 2023 dengan tahun data 2022. Melalui berbagai temuan dari hasil analisis kesenjangan ini diharapkan dapat memberikan alternatif dalam penguatan perencanaan yang berbasis wilayah/Kecamatan.

1.2 Maksud dan Ruang Lingkup Analisis

Maksud dari Analisis Indeks Ketimpangan Wilayah Kota Palu Tahun 2023 adalah untuk menyediakan hasil analisis sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan Kota Palu, terutama dalam upaya mengurangi kesenjangan yang ada.

Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk melihat perbedaan pertumbuhan ekonomi dan distribusi sumber daya antar wilayah selama lima tahun terakhir digunakan data PDRB Lapangan Usaha menurut kecamatan. Hal ini disebabkan lebih mudah dan akurat mendapatkan informasi.

1.3 Tujuan

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk menyejahterakan penduduk. Oleh karena itu hasil pembangunan diharapkan dapat dinikmati oleh semua lapisan penduduknya. Berbagai upaya eliminasi terhadap distorsi pembangunan dilakukan dengan mengetahui ketimpangan baik secara ekonomi maupun kesempatan.

Adapun tujuan Analisis Indeks Ketimpangan Wilayah Kota Palu yaitu:

1. Mengukur ketimpangan pendapatan antarkecamatan di Kota Palu.
2. Menganalisis sektor potensial kecamatan di Kota Palu.
3. Mengelompokkan tiap-tiap wilayah kecamatan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita dan mengelompokkan sektor-sektor dalam klasifikasi 4 kuadran.

1.4 Sistematika Penulisan

Publikasi ini disusun menjadi enam bab. Bab satu membahas pendahuluan yang berisi latar belakang, maksud dan ruang lingkup analisis, tujuan analisis sistematika penulisan, serta dasar pelaksanaan. Bab dua berisi tinjauan pustaka yang menjabarkan teori pertumbuhan ekonomi, definisi pembangunan, Produk Domestik Regional Bruto, ketimpangan Pembangunan Antarwilayah, dan ukuran-ukuran tingkat ketimpangan. Bab tiga mendeskripsikan data yang digunakan dan metode analisis. Bab empat memberikan gambaran secara umum kondisi Kota Palu, meliputi kondisi perekonomian, dan keadaan penduduk. Bab lima memaparkan hasil olahan data dan pembahasan mengenai ketimpangan Pembangunan Antar Kecamatan di Kota Palu. Bab ini memaparkan

karakteristik penduduk menurut kelompok pengeluaran. Selain itu, dibahas juga hasil pengukuran kesenjangan berdasarkan Analisis Ketimpangan, Analisis *Location Quotient*, Analisis *Shift Share*, Analisis Typology Klassen, Selain itu juga dibahas identifikasi penyebab dan pengaruh pandemi Covid-19 terhadap ketimpangan. Bab terakhir adalah bab enam, berisi kesimpulan dan saran.

1.5 Referensi Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, status Kota Palu sebagai ibu kota ditingkatkan menjadi Ibu kota Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1978, Kota Palu peetapan sebagai kota administratif. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Badan.

PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA PALU 2018-2022



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA PALU 2018-2022



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Dimana pertumbuhan ekonomi menggambarkan perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara atau wilayah secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional.

Secara umum teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat di kelompokkan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik yang dicetuskan Adam Smith dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi didasarkan pada kepercayaan dan efektivitas mekanisme pasar bebas. Sedangkan dalam teori modern, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi beberapa faktor utama, yaitu investasi, pertumbuhan penduduk dan teknologi (Todaro, 2000). Sumber utama pertumbuhan ekonomi adalah investasi yang mampu memperbaiki kualitas modal dan sumber daya

manusia. Selanjutnya akan meningkatkan sumber daya produktif dan menaikkan produktivitas sumber daya melalui inovasi dan kemajuan teknologi.

Mankiw (2003) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Menurut Boediono (2013) pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Dengan kata lain, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam konteks perekonomian suatu negara karena dapat menjadi salah satu ukuran dari pertumbuhan atau pencapaian perekonomian bangsa tersebut.

Menurut Mankiw (2003) indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Ada beberapa alasan yang mendasari pemilihan pertumbuhan ekonomi menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) dan bukan indikator lainnya. Alasan tersebut di antaranya bahwa PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian, hal ini berarti peningkatan PDB juga mencerminkan

peningkatan balas jasa kepada faktor- faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut. Pembangunan merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai dengan perubahan struktural yakni perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

2.2. Definisi Pembangunan

Pembangunan dapat dipandang sebagai proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi yang ada di masyarakat, selain akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan kesenjangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Jadi pada hakikatnya, pembangunan itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih baik secara material maupun spiritual (Todaro dan Smith, 2006). Proses pembangunan di masyarakat paling tidak harus memiliki tiga tujuan utama, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan.
2. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penyediaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan material, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara- bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

2.3. Pengertian dan Cakupan Wilayah

Setiono (2011) mengartikan secara umum wilayah adalah suatu entitas ruang di muka bumi dengan luasan dan posisi yang tertentu. Dalam ilmu kewilayahan, wilayah adalah satuan entitas ruang tertentu yang digunakan untuk keperluan analisis kewilayahan.

Ukuran entitas wilayah atau batasan lingkup dalam analisis kewilayahan akan sangat tergantung pada sudut pandang pendekatan yang dilakukan. Secara umum cakupan wilayah dalam analisis ilmu kewilayahan dapat bervariasi, yakni:

- Lokal dan regional (wilayah)

Lingkup wilayah lokal misalnya pada tingkat satuan wilayah komunitas. Contohnya sistem sanitasi lingkungan, analisis pemukiman kumuh dan lain sebagainya. Sedangkan lingkup regional meliputi satuan wilayah yang lebih luas, misalnya analisis ekonomi kabupaten, analisis tata guna lahan pada wilayah DAS dan lain sebagainya.

- Menurut batas administrasi

Misalnya adalah satuan wilayah administrasi desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan daerah perbatasan.

- Menurut kondisi dan karakter geografi

Berupa satuan wilayah pulau, bentangan alam di kawasan pantai pesisir, kawasan pedalaman, hamparan dataran rendah, pegunungan dan sebagainya.

- Menurut karakter kegiatan sosial ekonomi

Ditetapkan berdasarkan karakteristik tertentu, misalnya analisis pola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah perkotaan (urban) dan di wilayah perdesaan.

Pada studi ekonomi regional atau ekonomi kewilayahan dapat dipandang sebagai upaya untuk memahami karakter keruangan dari sistem ekonomi. Menurut Hoover pengertian ekonomi kewilayahan dapat disimpulkan dalam beberapa pertanyaan kunci, yakni: **Apa dimana, dan mengapa serta lantas apa? (*what is where, and why and so what?*)**.

- APA : berlaku terhadap seluruh kegiatan ekonomi, bukan saja arti produksi dalam arti sempit seperti pabrik, perkebunan, dan pertambangan, tetapi juga kegiatan ekonomi lainnya yang meliputi seluruh stake holder mulai dari rumah tangga, komunitas masyarakat, swasta dan lembaga pemerintah.

- DIMANA : berlaku terhadap lokasi berkaitan dengan kegiatan ekonomi lainnya; termasuk tentang proximity, konsentrasi, penyebaran dan kemiripan atau keanekaragaman kegiatan.
- MENGAPA dan LANTAS APA : berkaitan dengan batas-batas elastik dari analisis kompetensi ekonomi serta langkah kebijakan untuk melakukan rencana tindakan lanjut (*action plan*).

2.4. Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional/Wilayah

Proses pembangunan bukan hanya berkaitan dengan aspek ekonomi saja. Namun pertumbuhan ekonomi merupakan unsur penting dalam proses pembangunan wilayah di Indonesia. Wilayah yang dimaksudkan disini adalah dapat berbentuk provinsi, kabupaten atau kota. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi merupakan target utama pembangunan dalam rencana pembangunan wilayah, disamping pembangunan sosial. Sedangakan target pertumbuhan ekonomi tersebut ternyata sangat bervariasi sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah (Syafrizal, 2008).

Sasaran utama analisa pertumbuhan ekonomi regional (wilayah) adalah untuk menjelaskan mengapa suatu wilayah dapat tumbuh cepat dan ada wilayah tumbuh lambat. Selain itu untuk sasaran analisa pertumbuhan

ekonomi regional dapat pula menjelaskan mengapa terjadi ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah.

Menurut Arsyad (1999), faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah :

- 1 Akumulasi Modal termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah, peralatan fiskal, dan sumberdaya manusia (*human resources*).
- 2 Pertumbuhan Penduduk.
- 3 Kemajuan Teknologi.

Penekanan pertumbuhan ekonomi regional lebih dipusatkan pada pengaruh perbedaan karakteristik *space* terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan, faktor yang menjadi perhatian utama dalam teori pertumbuhan ekonomi regional (Robinson Tarigan, 2005):

1. Keuntungan Lokasi
2. Aglomerasi Migrasi
3. Arus lalu lintas modal antar wilayah.

2.5. Model Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pada prakteknya penerapan model pertumbuhan ekonomi dilakukan secara utuh ataupun dilakukan penggabungan dari beberapa model tertentu, berdasarkan kondisi wilayahnya. Model pertumbuhan ekonomi wilayah adalah sebagai berikut:

2.5.1. Model Basis Ekspor (*Export-base Model*)

Model ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh keuntungan kompetitif (*competitive advantage*) yang dimiliki oleh daerahnya. Bila daerah yang bersangkutan dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang mempunyai keuntungan kompetitif sebagai basis untuk ekspor, maka pertumbuhan daerah tersebut akan dapat ditingkatkan, dikarenakan peningkatan ekspor tersebut memberikan dampak berganda (*multiplier effect*) kepada perekonomian daerah. Metode analisa yang dapat digunakan oleh model basis ekspor dengan 2 (dua) cara, yakni:

a. Penaksiran *Multiplier Export*

Model dan tehnik analisa yang diperlukan adalah pengukuran besarnya pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta penaksiran koefisien multiplier wilayah.

b. Shift-Share Analysis

Dari teori diketahui bahwa adanya peningkatan ekspor dikarenakan daerah tersebut memiliki keuntungan kompetitif yang cukup besar untuk beberapa sektor tertentu. Digunakan analisis *Shift-share*, terdiri dari 3 (Tiga), yakni dengan *Regional Share*, *Proportionality Shift (Mixed Shift)*, dan *Differential Shift (Competitive Shift)*.

2.5.2. Model *Interregional Income*

Model ini memasukan unsur hubungan ekonomi antar wilayah, dimana ekspor diasumsikan sebagai faktor yang berada dalam sistem (*endogeneous variable*) yang ditentukan oleh perkembangan kegiatan perdagangan antar wilayah. Perdagangan antar wilayah tersebut, dibagi atas barang konsumsi dan barang modal. Model region ini memasukan unsur pemerintah yang ditampilkan dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah serta kegiatan investasi sesuai dengan prinsip Teori Ekonomi *Keynes*.

2.5.3. Model Neo-klasik

Model ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan daerah tersebut untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Sedangkan kegiatan produksi suatu

daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi daerah yang bersangkutan, melainkan juga ditentukan oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal antar daerah.

2.5.4. Model Penyebab Berkumulatif (*Cumulative Causation Model*)

Model ini tidak percaya pemerataan pembangunan antar daerah akan dapat dicapai dengan sendirinya berdasarkan mekanisme pasar. Menurut model ini, ketimpangan pembangunan regional hanya dapat dikurangi melalui program pemerintah. Bila hanya diserahkan pada mekanisme pasar, maka ketimpangan regional akan terus meningkat seiring dengan peningkatan proses pembangunan.

2.6. Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

Ketimpangan pertumbuhan antarwilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan terjadi pada umumnya disebabkan oleh perbedaan kandungan sumber daya alam yang dimiliki daerah dan kondisi demografi. Akibatnya suatu daerah dengan daerah lain akan berbeda laju pertumbuhan ekonominya, sehingga akan berbeda pula implikasi formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang akan dilakukan oleh pemerintah daerahnya.

Secara teoritis, permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah pada mulanya dimunculkan oleh Douglas C. North tentang “Teori Pertumbuhan Neo-klasik”. Pada teori tersebut melakukan prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa ini kemudian dikenal sebagai “*Hipotesa Neo-klasik*”.

Menurut *Hipotesa Neo-klasik* pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat (lebih tinggi). Proses tersebut terus meningkat sampai pada titik puncak, dan kemudian merangsang-angsur akan menurun ketimpangan daerahnya. Hal ini terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang. Sementara pada negara-negara maju, ketimpangan antar wilayah cenderung lebih rendah. Kecenderungan pada negara berkembang ketimpangan wilayah lebih tinggi disebabkan pada saat proses pembangunan baru dimulai, kesempatan dan peluang pembangunan yang ada umumnya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunan/ekonomi sudah lebih kuat. Wilayah/daerah yang baru berkembang (terbelakang) tidak mampu memanfaatkan peluang dan kesempatan tersebut, dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana serta

rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hambatan tersebut bukan saja dari sektor ekonomi, melainkan dari sektor sosial-budaya sehingga mengakibatkan ketimpangan pembangunan antar wilayah meningkat. Hal ini terjadi bukan karena kesalahan pemerintahnya, melainkan secara natural terjadi hampir pada seluruh negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia.

2.7. Penyebab Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

Unsur yang menyebabkan ketimpangan pembangunan antar wilayah (Syafrizal,2008) adalah:

a. Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam (SDA)

Penyebab utama yang mendorong timbulnya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah adanya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan SDA yang dimiliki masing-masing daerah. Perbedaan SDA akan mempengaruhi kegiatan produksi daerah tersebut.

b. Perbedaan Kondisi Demografi

Kondisi demografi yang dimaksudnya adalah meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi

ketenagakerjaan, dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat di daerahnya. Bila kondisi demografisnya baik, maka akan mendorong produktivitas kerja yang tinggi. Sehingga mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

c. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar wilayah dan migrasi baik yang disponsori oleh pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Bila mobilisasi kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Demikian pula bila migrasi kurang lancar, menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah yang membutuhkan. Akibatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah yang membutuhkan, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.

d. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah

Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi cukup besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Sebaliknya daerah konsentrasi kegiatan ekonominya rendah akan mendorong terjadinya pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat setempat.

Konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut dapat disebabkan oleh:

- Terdapatnya SDA yang lebih banyak pada daerah tersebut, misalnya nikel, minyak bumi, gas, dll. Selain itu terdapat lahan yang subur yang turut mempengaruhi tingginya kegiatan ekonomi, misalnya sektor pertanian.
- Meratanya fasilitas transportasi Darat, Laut dan Udara.
- Kondisi Demografis (kependudukan), ikut mempengaruhi kegiatan ekonomi. Karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi dimana SDM tersedia dengan kualitas yang lebih baik.

e. Alokasi Dana Pembangunan Antar Wilayah

Investasi merupakan salah satu yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi daerah. Daerah yang memiliki alokasi investasi yang lebih tinggi dari pemerintah maupun dari sektor swasta cenderung mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Berdampak pada penyerapan tenaga kerja lebih tinggi dan tingkat pendapatan perkapita penduduk akan lebih tinggi.

2.8. Ukuran Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

Menurut Sjafrizal (2012), Ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat diukur dengan Indeks Williamson menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebagai data dasar. Alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antarwilayah dan bukan tingkat distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat.

Dengan menggunakan Indeks Williamson, maka dapat dilihat seberapa besar ketimpangan yang terjadi antar wilayah. Dan besaran nilai berkisar antara angka 0-1. Kriteria penilaian Indeks Williamson menurut Matolla, (2007), dibagi menjadi kesenjangan level rendah, sedang, atau tinggi.

Indeks lainnya yang juga lazim digunakan dalam mengukur

ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah *Entropi Theil Index*. Data yang diperlukan untuk menghitung indeks ini sama dengan yang diperlukan untuk menghitung *Williamson Index* yaitu PDRB per kapita dan jumlah penduduk untuk setiap wilayah. Demikian pula halnya yang dengan penafsirannya yang juga sama yaitu bila indeks mendekati 1 artinya sangat timpang dan sebaliknya bila indeks mendekati 0 berarti sangat merata.

Menurut Ying (2000) (dikutip oleh Kuncoro 2004) untuk mengukur ketimpangan pendapatan regional bruto provinsi, menggunakan Entropi Theil. Indeks Entropi Theil tersebut dapat dibagi/diurai menjadi dua subindikasi, yaitu ketimpangan regional dalam wilayah dan ketimpangan regional antarwilayah atau regional.

Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan indeks williamson yaitu lebih mudah dan praktis untuk mengukur ketimpangan antar daerah. Namun terdapat kelemahannya adalah sensitif terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan. Sedangkan, kelebihan dari indeks entopi theil yang pertama adalah indeks ini menghitung ketimpangan dalam daerah dan antardaerah secara bersamaan, sehingga cakupan analisis menjadi lebih luas. Kelebihan kedua adalah indeks ini dapat menghitung kontribusi (dalam presentase) masing-masing daerah terhadap

ketimpangan pembangunan wilayah secara keseluruhan sehingga dapat memberikan implikasi kebijakan yang cukup penting.

2.9. Analisis Potensi Perekonomian Wilayah

Dengan berlakunya Otonomi daerah, di masing-masing daerah kini lebih memiliki wewenang didalam menentukan sektor atau komoditi yang lebih diprioritaskan untuk pengembangannya. Peran pemerintah untuk menganalisis kelemahan dan kelebihan dari sektor yang akan di unggulkan sangat dibutuhkan. Sehingga, *leading sector* tersebut dapat mempengaruhi sektor yang lainnya untuk dapat berkembang. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan potensi perekonomian suatu wilayah yaitu *Location Quotient* (LQ), analisis *Shift-Share*, dan analisis Tipologi Klassen.

2.9.1. Analisis *Location Quotient* (LQ)

Suatu kecamatan dapat memiliki berbagai sektor yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Sektor-sektor yang digerakkan dalam satu kecamatan, merupakan gambaran dari aktivitas masyarakat di kecamatan tersebut. Berdasarkan analisis *Location Quotient* (LQ) sektor diklasifikasikan menjadi 2 golongan yaitu Sektor Basis dan Sektor Non Basis. Pembangunan harus fokus, sehingga keputusan untuk

mengembangkan suatu sektor menjadi sangat penting. Berikut diuraikan tentang analisis *Location Quotient* (LQ).

Dalam melakukan pengukuran basis menggunakan alat analisis *Location Quotient* (LQ), kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi menjadi 2 golongan, yaitu :

- Sektor Basis

Kegiatan ekonomi yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan.

- Sektor Non Basis

Kegiatan ekonomi yang melayani pasar di daerah tersebut.

Asumsi pada analisis LQ adalah semua penduduk di setiap daerah mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan pada tingkat nasional (pola pengeluaran secara geografis sama), produktivitas tenaga kerja sama, dan setiap industri menghasilkan barang yang homogen pada setiap sektor. (Lincoln Arsyad, 1999).

2.9.2. Shift Share

Shift Share adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan

kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan daerah yang lebih besar (nasional). Analisis ini menggunakan 3 informasi dasar yang berhubungan satu sama lain yaitu:

- a. Pertumbuhan ekonomi referensi nasional yang menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan referensi terhadap perekonomian di Kabupaten/Kota.
- b. Pergeseran proporsional (*Proportional shift*), yang menunjukkan perubahan relatif kinerja suatu sektor di Kabupaten/Kota terhadap sektor yang sama di referensi.
- c. Pergeseran diferensial (*Differential Shift*), yang memberikan informasi dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri Kabupaten/Kota dengan perekonomian yang dijadikan referensi (Arsyad, 1999)

2.9.3. Tipologi Klassen

Pendapatan suatu wilayah dalam lingkup kecamatan perlu diketahui, sehingga untuk upaya pembangunan akan mudah mengintervensi melalui program pembangunan. Tipologi Klasen merupakan salah satu upaya pemetaan pengelompokan pembangunan wilayah, sehingga program-

program pembangunan yang digulirkan dapat tepat sasaran sesuai tipologi wilayah tersebut.

Menurut Kuncoro (2004), menyebutkan bahwa Tipologi Klassen (*Klassen Typology*) digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Melalui analisis ini diperoleh empat karakteristik pola dan struktur pertumbuhan ekonomi yang berbeda, yaitu: daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*Rapid Growth*), daerah maju tapi tertekan (*Retarded Region*), daerah berkembang cepat (*Growing Region*), dan daerah relatif tertinggal (*Relatively Region*). Lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Pengelompokan Pembangunan Wilayah Berdasarkan Tipologi Klassen

r / S_k y / S	$r_i < r$ $S_{ki} < S_K$	$r_i > r$ $S_{ki} > S_K$
$y_i > y$ $S_i > S$	<p>Kuadran II</p> <p>Wilayah maju tetapi tertekan (<i>Stagnant Sector</i>), yaitu daerah yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding dengan rata-rata kabupaten.</p>	<p>Kuadran I</p> <p>Wilayah maju dan tumbuh cepat (<i>Developed Sector</i>), yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibanding rata-rata kabupaten</p>
$y_i < y$ $S_i < S$	<p>Kuadran III</p> <p>Wilayah yang relatif tertinggal (<i>Undeveloped Sector</i>), yaitu adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita yang lebih rendah dibanding dengan rata-rata kabupaten</p>	<p>Kuadran IV</p> <p>Wilayah yang berkembang cepat (<i>Developing Sector</i>), yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten</p>

Sumber : Sjafrizal (2008)

Keterangan :

y = PDRB per kapita Kab/Kota

y_i =PDRB per kapita di Kecamatan

r =Laju pertumbuhan PDRB di Kab/Kota

r_i =Laju pertumbuhan PDRB tiap Kecamatan

S =PDRB Kab/Kota

S_i =Nilai sektor i di Kecamatan

S_{ki} =Kontribusi nilai sektor i terhadap PDRB Kecamatan

SK =Kontribusi nilai sektor i terhadap PDRB kab/Kota

JUMLAH PENDUDUK KOTA PALU 2022



KOTA PALU
381.572

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam penghitungan dan pengukuran berasal dari (alokator) PDRB Lapangan Usaha Tahun 2017 sampai dengan 2021. Selain itu, sebagai data pendukung juga digunakan data yang terkait dengan variabel kependudukan, kemiskinan dan perekonomian hasil kompilasi. Sumber data tersebut sebagian berasal dari publikasi yang telah diterbitkan oleh BPS Kota Palu maupun BPS Provinsi Sulawesi Tengah.

3.2 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk mengkaji ketimpangan antar wilayah di Kota Palu adalah Indikator Indeks Williamson, Indeks Entropi Theil, *Location Quotient* (LQ), *Shift Share* (SS), dan Tipologi Sektoral.

3.2.1 *Location Quotient* (LQ)

Asumsi pada analisis LQ adalah semua penduduk di setiap daerah mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan pada tingkat nasional (pola pengeluaran secara geografis sama), produktivitas tenaga kerja sama, dan setiap industri menghasilkan barang yang homogen

pada setiap sektor (Lincoln Arsyad, 1999).

Menurut Tarigan (2005), persamaan matematik analisis *Location Quotient* (LQ) adalah:

$$LQ = \frac{S_i/S}{N_i/N}$$

Dimana:

S_i : Nilai tambah sektor i di Kecamatan;

S : PDRB di Kecamatan;

N_i : Nilai tambah sektor i di Kabupaten/Kota;

N : PDRB (Kabupaten/Kota).

Dari perhitungan LQ, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jika nilai $LQ > 1$, maka sektor tersebut merupakan sektor basis. Sektor tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan di dalam daerah saja namun juga kebutuhan di luar daerah karena sektor ini sangat potensial untuk dikembangkan.
2. Jika nilai $LQ = 1$, maka sektor tersebut hanya cukup memenuhi kebutuhan di daerahnya saja.
3. Jika nilai $LQ < 1$, maka sektor tersebut merupakan sektor non basis dan perlu impor produk dari luar daerah karena sektor ini kurang prospektif untuk dikembangkan

3.2.2 *Shift Share* (SS)

Analisis ini menggunakan 3 informasi dasar yang berhubungan satu sama lain yaitu :

- a. Pertumbuhan ekonomi referensi nasional yang menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan referensi terhadap perekonomian di Kabupaten/Kota.
- b. Pergeseran proporsional (*Proportional shift*), yang menunjukkan perubahan relatif kinerja suatu sektor di Kabupaten/Kota terhadap sektor yang sama di referensi.
- c. Pergeseran diferensial (*Differential Shift*), yang memberikan informasi dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri Kabupaten/Kota dengan perekonomiannya yang dijadikan referensi (Arsyad, 1999).

Menurut Widodo (2006), bentuk umum persamaan dari analisis *shift share* dan komponen-komponennya adalah :

- $D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$
- $N_{ij} = E_{ij} \times R_n$
- $M_{ij} = E_{ij} (R_{in} - R_n)$
- $C_{ij} = E_{ij} (R_{ij} - R_{in})$

Dimana:

I = Sektor-sektor yang diteliti;

j = Wilayah yang teliti (Kabupaten/Kota);

D_{ij} = Dampak nyata pertumbuhan ekonomi daerah (di tiap Kecamatan) daripengaruh pertumbuhan Kabupaten/Kota;

N_{ij} (*National share*) = Pengaruh pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota terhadap perekonomian daerah (di tiap Kecamatan);

M_{ij} = Pergeseran proporsional (*proportional shift*) atau pengaruh bauran industri

C_{ij} (*Differential Shift*) = Pengaruh keunggulan kompetitif suatu sektor tertentu di(tiap Kecamatan) dibanding tingkat Kabupaten/Kota;

E_{ij} = PDRB (Output) sektor i (di tiap Kecamatan);

R_{ij} = Tingkat pertumbuhan sektor i (di tiap Kecamatan);

R_{in} = Tingkat pertumbuhan sektor i (Kabupaten/Kota);

R_n = Tingkat pertumbuhan PDRB (Kabupaten/Kota).

3.2.3 Tipologi Klassen

Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Melalui analisis ini diperoleh empat karakteristik pola dan struktur pertumbuhan ekonomi yang berbeda, yaitu: daerah cepatmaju dan cepat tumbuh (*Rapid Growth*), daerah maju tapi tertekan (*Retarded Region*), daerah berkembang cepat (*Growing Region*), dan daerah relatif

tertinggal (*Relatively Region*). Lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Pengelompokan Pembangunan Wilayah Berdasarkan Tipologi Klassen

r/S_k y/S	$r_i < r$ $S_{ki} < S_K$	$r_i > r$ $S_{ki} > S_K$
$y_i > y$ $S_i > S$	Kuadran II Wilayah maju tetapi tertekan (<i>Stagnant Sector</i>), yaitu daerah yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibanding dengan rata-rata kabupaten.	Kuadran I Wilayah maju dan tumbuh cepat (<i>Developed Sector</i>), yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibanding rata-rata kabupaten
$y_i < y$ $S_i < S$	Kuadran III Wilayah yang relatif tertinggal (<i>Undeveloped Sector</i>) yaitu adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita yang lebih rendah dibanding dengan rata-rata kabupaten	Kuadran IV Wilayah yang berkembang cepat (<i>Developing Sector</i>) yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten

Sumber : Sjafrizal (2008)

Keterangan

- y = PDRB per kapita Kab/Kota;
- y_i = PDRB per kapita di Kecamatan;
- r = Laju pertumbuhan PDRB di Kab/Kota;
- r_i = Laju pertumbuhan PDRB tiap Kecamatan ;
- S = PDRB Kab/Kota;
- S_i = Nilai sektor i di Kecamatan;
- S_{Ki} = Kontribusi nilai sektor i terhadap PDRB Kecamatan;
- S_K = Kontribusi nilai sektor i terhadap PDRB kab/Kota.

3.2.4 Indeks Williamson

Indeks Williamson untuk menentukan besarnya ketimpangan pendapatan antar wilayah. Dalam Penelitian Sutarno & Kuncoro (2003), Indeks Williamson merupakan hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi dengan menggunakan data ekonomi yang sudah maju dan berkembang.

Formulasi Indeks Williamson secara statistik dapat ditampilkan dengan formula sebagai berikut :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^m (Y_i - Y)^2 (f_i/n)}}{Y}$$

Dimana:

- IW : Indeks Williamson;
- Y_i : PDRB Per kapita kecamatan ke- i ;
- Y : PDRB Per kapita Kota/Kabupaten;
- f_i : Jumlah Penduduk tiap Kecamatan ke- i ;
- k : Banyaknya Kecamatan;
- n : Jumlah Penduduk Kota/Kabupaten.

Dengan menggunakan Indeks Williamson, maka dapat dilihat seberapa besar ketimpangan yang terjadi antar wilayah. Dan besaran nilai berkisar antara angka 0-1. Kriteria penilaian Indeks Williamson menurut Matolla, (2007) dibagi menjadi kesenjangan level rendah, sedang, atau tinggi sebagai berikut:

- a. $IW < 0,35$ tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah rendah.
- b. $0,35 \leq IW \leq 0,5$ tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah sedang.
- c. $IW > 0,5$ tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah tinggi.

3.2.5 Indeks Entropi Theil

Selain menggunakan Indeks Williamson, untuk mengukur suatu ketimpangan pendapatan dapat menggunakan Indeks Entropi Theil. Menurut Kuncoro (2001) konsep Entropi Theil dari satu distribusi pada dasarnya merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur

ketimpangan ekonomi dan konsentrasi industri. Data yang diperlukan dalam analisis Indeks Theil adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Indeks Theil dapat dikomposisi menjadi Indeks Theil Within dan Between. Secara matematis Indeks Theil dapat dituliskan sebagai berikut ;

$$T_{Total} = Theil\ Within + Theil\ Between$$

$$T_{Total} = \sum_{i=1}^k (y_i/Y) \times (\bar{Y}/Y) \ln[(X/x_i)] + (y_i/Y) \ln[(x_i/X)]$$

Dimana :

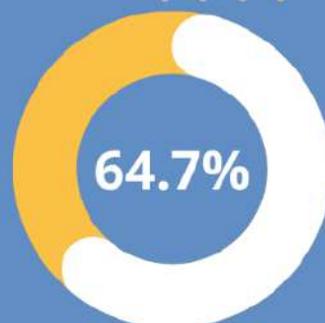
- y_i : PDRB Kecamatan;
- Y : PDRB Kabupaten/Kota;
- \bar{Y} : Rata-rata PDRB Kecamatan;
- x_i : PDRB perkapita Kecamatan;
- X : PDRB perkapita Kabupaten/Kota;
- k : Banyaknya Kecamatan.

Kelebihan indeks williamson lebih mudah dan praktis untuk mengukur ketimpangan antar daerah. Namun terdapat kelemahan indeks Williamson adalah sensitif terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan. Sedangkan, kelebihan dari indeks entopi theil yang pertama adalah indeks ini menghitung ketimpangan dalam daerah dan antardaerah secara sekaligus, sehingga cakupan analisis menjadi lebih luas,

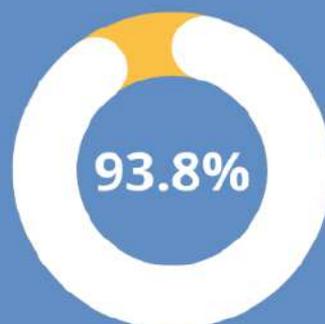
yang kedua adalah indeks ini dapat pula dihitung kontribusi (dalam presentase) masing-masing daerah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah secara keseluruhan sehingga dapat memberikan implikasi kebijakan yang cukup penting.

INDIKATOR KETENAGAKERJAAN KOTA PALU 2018-2022

Penduduk Usia Kerja Tahun 2022



Angkatan Kerja Tahun 2022



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2018-2022



Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018-2022



BAB IV GAMBARAN UMUM KOTA PALU

4.1 Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Palu pada tahun 2022 sebanyak 381.572 jiwa atau tumbuh 1,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penduduk tersebut paling banyak tersebar di Kecamatan Mantikulore, diikuti Kecamatan Palu Selatan dan paling sedikit ada di Kecamatan Tawaeli. Pertambahan penduduk Kota Palu utamanya diduga karena pengaruh migrasi masuk. Kota Palu selain memiliki daya tarik sebagai kota tujuan sektor niaga dan jasa, juga sebagai kota tujuan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Banyak perguruan tinggi tersebar di Kecamatan Mantikulore dan Palu Selatan.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Palu Tahun 2018-2022

Wilayah	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mantikulore	73.901	75.305	76.745	77.949	79.312
Palu Barat	47.140	46.786	46.435	46.544	46.737
Palu Selatan	69.560	71.197	72.059	72.674	73.426
Palu Timur	45.326	43.978	43.318	43.441	43.643

Palu Utara	23.506	23.978	24.458	24.716	25.021
Tatanga	49.000	51.350	52.580	53.270	54.066
Tawaeli	21.807	22.185	22.568	22.900	23.279
Ulujadi	32.053	34.013	35.055	35.536	36.088
Kota Palu	362.293	368.792	373.218	377.030	381.572

Sumber: BPS Kota Palu (2022)

4.2 Gambaran Data Indikator Makro Kota Palu

4.2.1 Perekonomian

Kinerja pembangunan suatu daerah salah satunya terlihat melalui pertumbuhan ekonomi. Sebagai salah satu indikator strategis, pertumbuhan ekonomi sering digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan atau keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Terlepas dari adanya kritik yang meragukan kemampuan indikator ini untuk mengukur tingkat kesejahteraan, namun sejauh ini indikator tersebut masih dianggap sebagai alat ukur yang sederhana dan mudah digunakan. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan yang berkualitas, mampu menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan mengurangi tingkat pengangguran, serta tercapainya kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Selama lima tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi di Kota Palu

mengalami fluktuasi. Meskipun secara rata-rata pertumbuhan ekonomi masih di kisaran 5 persen pertahun, namun pertumbuhan ekonomi Kota Palu menunjukkan percepatan pada empat tahun terakhir sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sebesar 5,00 persen dan menjadi 5,65 persen pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 disebabkan dari dampak pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi Kota Palu mengalami kontraksi dengan pertumbuhan sebesar -4,43 persen, pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Palu mengalami kenaikan yang melejit sebesar 5,97 persen. Selanjutnya pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kota Palu tetap positif menjadi 4,32 persen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa selama lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kota Palu mengalami akselerasi. Tingginya kenaikan pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan adanya pembangunan pasca gempa 2018. Selain itu, juga adanya pembangunan fasilitas infrastruktur penunjang seperti kelanjutan pembangunan fasilitas lainnya.

Peningkatan kegiatan ekonomi yang ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi diharapkan membawa konsekuensi secara langsung pada peningkatan pendapatan. Harapannya dapat membawa kesejahteraan bagi penduduk di Kota Palu.

4.2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Ada dua aspek yang perlu diperhatikan untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Perkembangan angka IPM Kota Palu dari Tahun 2018 sampai Tahun 2022 terlihat pada Gambar 4.1.



Sumber: Publikasi IPM Kota Palu (2021)

Gambar 4.1 Perkembangan IPM Kota Palu Tahun 2018-2022

Secara umum, pembangunan manusia Kota Palu mengalami kemajuan selama periode 2018 hingga 2022. Pada tahun 2019 IPM meningkat sebesar 0,59 poin dibandingkan tahun 2018 menjadi 81,5 persen,

sedangkan pada tahun 2020, IPM Kota Palu menurun sebesar -0,03 poin atau 0,04 persen menjadi 81,47 poin. Selanjutnya pada tahun 2021, IPM Kota Palu meningkat sebesar 0,23 poin atau 0,28 persen. IPM Kota Palu tahun 2022 sebesar 82,02 persen.

Angka IPM Kota Palu merupakan IPM tertinggi di antara semua kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini terlihat posisi peringkat Kota Palu masih sama dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 4.2 IPM Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2022

Kabupaten/Kota		IPM Tahun 2022
(1)	(2)	
1	Banggai Kepulauan	66,08
2	Banggai	71,08
3	Morowali	72,55
4	Poso	71,93
5	Donggala	66,25
6	Tolitoli	66,76
7	Buol	68,72
8	Parigi Moutong	66,26
9	Tojo Una-Una	65,54
10	Sigi	69,05
11	Banggai Laut	66,22
12	Morowali Utara	68,97
71	Kota Palu	82,02
Sulawesi Tengah		70,28

Sumber: Publikasi IPM Kota Palu (2022).

4.2.3 Kemiskinan

Tabel 4.3 menyajikan perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Palu pada kurun waktu 2018-2022. Selama kurun waktu tersebut terlihat bahwa kemiskinan, baik dari sisi jumlah maupun persentase (P_0), di Kota Palu mengalami kenaikan.

Selama lima tahun terakhir, kenaikan penduduk miskin pada Tahun 2021 tercatat sebagai yang tertinggi, dimana pada saat itu jumlah penduduk miskin naik sebanyak 28,60 ribu orang atau sebanyak 7,17 persen.

Tabel.4.3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Kota Palu Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Penduduk Miskin (ribu Jiwa)	25,26	26,62	26,89	28,60	26,75
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,58	6,83	6,80	7,17	6,93

Sumber: BPS Kota Palu (2022).

4.2.4 Tenaga Kerja

Tabel 4.4 menyajikan indikator ketenagakerjaan di Kota Palu periode 2018-2022 . Dibandingkan tahun 2021, jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2022 meningkat 1,46 persen dan jumlah pengangguran pada tahun

2022 turun sebesar 18,48 persen dibandingkan tahun 2021. Jika dilihat dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2022 mencapai 6,15 persen atau turun 1,46 persen poin dibanding tahun 2021.

Tabel 4.4. Indikator Ketenagakerjaan Kota Palu Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penduduk Usia Kerja (ribu jiwa)	292,08	296,96	304,63	309,05	313,58
2	Angkatan Kerja (ribu jiwa)	192,24	193,86	202,47	201,08	202,81
	a. Bekerja	181,08	181,52	185,51	185,77	190,33
	b. Pengangguran	11,16	12,34	16,96	15,31	12,48
3	TPAK (%)	65,82	65,63	66,46	65,07	64,68
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,81	6,32	8,38	7,61	6,15

Sumber: BPS Kota Palu (2022).

SEKTOR BASIS PER KECAMATAN DI KOTA PALU*

*Sektor basis berdasarkan nilai LQ tertinggi



PALU BARAT

Tertinggi: Perdagangan
Besar & Ecerah, dkk
(2,88)

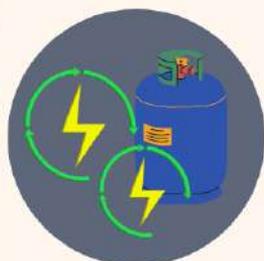
Terendah: Jasa Lainnya
(1,03)



TATANGA

Tertinggi: Pengadaan
Air, Pengelolaan
Sampah, dkk (4,11)

Terendah: Konstruksi
(1,39)



ULUJADI

Tertinggi: Pengadaan
Listrik & Gas (6,71)

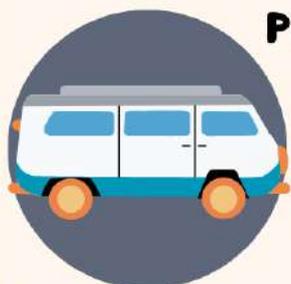
Terendah: Informasi dan
Komunikasi (1,05)



MANTIKULORE

Tertinggi: Jasa
Pendidikan (2,88)

Terendah: Pertambangan
dan Penggalian (1,00)



PALU SELATAN

Tertinggi: Transportasi
& Pergudangan (2,94)

Terendah: Jasa
Kesehatan dan Kegiatan
Sosial (1,09)



PALU TIMUR

Tertinggi: Penyediaan
Akomodasi & Makan
Minum (3,39)

Terendah: Perdagangan
Besar & Ecerah, dkk (1,03)



PALU UTARA

Tertinggi: Industri
Pengolahan (5,67)

Terendah: Pertambangan
dan Penggalian (1,48)



TAWAELI

Tertinggi: Pertanian,
Kehutanan, & Perikanan
(3,32)

Terendah: Informasi dan
Komunikasi (1,16)

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 5.1 memperlihatkan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Palu pada tahun 2018-2022 cenderung mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi Kota Palu pada tahun 2018 sebesar 5,00 persen. Fenomena Covid-19 yang berpengaruh hampir ke seluruh sektor perekonomian, menyebabkan adanya kontraksi perekonomian Kota Palu, sehingga pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Palu menjadi -4,43 persen. Selanjutnya dengan adanya pemulihan ekonomi secara nasional menyebabkan kondisi perekonomian menjadi membaik, ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Palu menjadi 5,97 persen pada Tahun 2021 dan kemudian melambat di Tahun 2022 menjadi 4,32.

Tabel 5.1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu Tahun 2018-2022

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	22.726,17	25.033,06	24.165,89	26.170,65	28.445,14
PDRB ADHK 2010 (Miliar Rupiah)	15.315,03	16.180,29	15.462,91	16.385,58	17.092,79
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,00	5,65	(4,43)	5,97	4,32

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palu, 2023.

Selanjutnya laju pertumbuhan ekonomi tiap kecamatan di Kota Palu terlihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan di Kota Palu Tahun 2018-2022 (%)

Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Palu Barat	(5,29)	12,19	(0,83)	18,23	(1,61)
Tatanga	(6,88)	9,76	(9,34)	21,88	(7,89)
Ulujadi	(10,48)	17,70	(16,57)	14,47	1,05
Palu Selatan	18,75	(18,33)	(5,24)	10,50	9,60
Palu Timur	(2,12)	13,29	(10,81)	16,90	3,65
Mantikulore	16,06	2,89	21,93	(16,95)	8,88
Palu Utara	(2,94)	3,73	(7,48)	10,52	3,99
Tawaeli	46,82	41,00	(47,00)	7,05	13,46

Sumber: Diolah dari Data Primer, 2023.

Tabel 5.2. memperlihatkan pertumbuhan ekonomi antar kecamatan yang fluktuatif dari Tahun 2018 hingga Tahun 2022. Secara umum kondisi di Tahun 2022, laju pertumbuhan mengalami perbaikan yang juga didorong oleh rekonstruksi pasca bencana dan pemulihan ekonomi akibat kondisi Pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada sektor-sektor industri dan jasa dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Pemulihan ekonomi merecoveri pertumbuhan ekonomi Kota Palu menjadi lebih baik.

Distribusi PDRB ADHB di Kota Palu Tahun 2018-2022 terlihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3. Distribusi PDRB ADHB antar Kecamatan di Kota Palu Tahun 2018 – 2022 (%)

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Palu Barat	10,58	11,41	12,00	13,34	12,60
Tatanga	6,93	7,23	7,02	8,06	7,07
Ulujadi	8,65	9,91	8,77	9,47	9,27
Palu Selatan	19,28	15,06	14,60	15,21	16,44
Palu Timur	17,11	18,20	17,10	18,72	18,53
Mantikulore	22,76	21,82	27,65	21,84	22,53
Palu Utara	9,43	9,18	9,04	9,47	9,43
Tawaeli	5,26	7,19	3,83	3,89	4,13
Kota Palu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Data Primer, 2023,

Tabel 5.3. memperlihatkan proporsi share terbesar PDRB Kota Palu dari Tahun 2018-2022 berasal dari Kecamatan Mantikulore. Kecamatan Mantikulore menjadi alternatif pengembangan wilayah juga berkontribusi paling banyak pada porsi PDRB Kota Palu. Jika melihat tren PDRB per kapita antar kecamatan dari Tahun 2018 hingga Tahun 2022 (Tabel 5.4), secara umum mengalami kenaikan setiap tahun. Tahun 2018 PDRB per kapita terbesar ada di Kecamatan Palu Utara senilai 93,32 juta rupiah per

penduduk per tahun, sedangkan PDRB per kapita terendah ada di Kecamatan Tatanga. Selanjutnya pada Tahun 2022, PDRB per kapita tertinggi ada di Kecamatan Palu Timur sebesar 120,75 juta rupiah per penduduk per tahun, dan PDRB per kapita terendah masih di Kecamatan Tatanga dengan nilai 37,21 juta rupiah per penduduk per tahun. Kecamatan Tatanga sebaiknya mendapatkan ‘perlakuan khusus’ intervensi kebijakan agar PDRB per kapita di kecamatan tersebut dapat ditingkatkan, karena berdasarkan data dari tahun 2018 hingga 2022 selalu menempati urutan terendah pendapatan per kapitanya (PDRB per kapita).

Tabel 5.4. PDRB per kapita (ADHB) Kecamatan di Kota Palu Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah)

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Palu Barat	51,02	61,02	62,45	75,00	76,71
Tatanga	32,16	35,23	32,24	39,58	37,21
Ulujadi	61,30	72,94	60,43	69,74	73,03
Palu Selatan	62,99	52,96	48,97	54,78	63,67
Palu Timur	85,78	103,60	95,40	112,77	120,75
Mantikulore	69,99	72,54	87,05	73,34	80,80
Palu Utara	91,14	95,87	89,34	100,25	107,22
Tawaeli	54,84	81,12	41,01	44,47	50,52
Kota Palu	62,73	67,88	64,75	69,41	74,55

Sumber: Diolah dari Data Primer, 2023.

5.2 Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

5.2.1. *Location Quotient* (LQ)

Location Quotient (LQ) digunakan untuk mengetahui sektor potensial di suatu wilayah. Analisis LQ berasumsi bahwa semua penduduk disetiap daerah mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan pada tingkat nasional, produktivitas tenaga kerja sama, dan setiap industri menghasilkan barang yang homogen pada setiap sektor (Lincoln Arsyad, 1999). Untuk mengukur LQ menggunakan indikator:

- Nilai tambah sektor i di Kecamatan;
- PDRB di Kecamatan;
- Nilai tambah sektor i di Kabupaten/Kota;
- PDRB (Kabupaten/Kota).

Hasil dari LQ menjadi dasar untuk mengetahui sektor yang potensial (sektor basis) dan sektor yang tidak potensial dikembangkan (sektor non basis). Hal ini berdasarkan pada:

- Nilai $LQ > 1$, maka sektor tersebut merupakan **sektor basis**. Sektor tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan di dalam daerah saja namun juga kebutuhan di luar daerah karena sektor ini sangat potensial untuk dikembangkan.

- Nilai $LQ = 1$, maka sektor tersebut hanya cukup memenuhi kebutuhan di daerahnya saja.
- Nilai $LQ < 1$, maka sektor tersebut merupakan **sektor non basis** dan perlu impor produk dari luar daerah karena sektor ini kurang prospektif untuk dikembangkan.

Selanjutnya pada penelitian ini LQ digunakan untuk mengetahui sektor potensial kecamatan yang ada di Kota Palu pada tahun 2018-2022. Nilai LQ yang tinggi menunjukkan semakin tinggi pula potensi keunggulan sektor tersebut, sehingga sektor dengan nilai LQ tertinggi dapat dipilih dikembangkan untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Peningkatan PDRB di Kota Palu berdasarkan pada sumbangsi dari 17 sektor. Sektor yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. **A** (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan);
2. **B** (Pertambangan dan Penggalian);
3. **C** (Industri Pengolahan);
4. **D** (Pengadaan Listrik dan Gas);
5. **E** (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang);

6. **F** (Konstruksi);
7. **G** (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor);
8. **H** (Transportasi dan Pergudangan);
9. **I** (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum);
10. **J** (Informasi dan Komunikasi);
11. **K** (Jasa Keuangan dan Asuransi);
12. **L** (Real Estate);
13. **M, N** (Jasa Perusahaan);
14. **O** (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib);
15. **P** (Jasa Pendidikan);
16. **Q** (Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial);
17. **R, S, T, U** (Jasa lainnya).

Hasil perhitungan LQ kecamatan di Kota Palu Tahun 2018-2022 terlihat pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5. Hasil Analisis *Location Quotient* (LQ) Kecamatan di Kota Palu Tahun 2018-2022

Sektor	Kecamatan							
	Palu Barat	Tatanga	Ulujadi	Palu Selatan	Palu Timur	Mantikulo	Palu Utara	Tawaeli
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	0,38	1,98	1,42	0,56	0,24	0,91	1,79	3,32
B	0,00	0,06	6,57	0,05	0,00	1,00	1,48	0,01
C	0,55	1,53	0,31	0,43	0,24	0,44	5,67	0,34
D	0,34	0,06	6,71	0,03	1,57	0,03	0,02	1,29
E	0,27	4,11	1,25	0,66	0,07	1,63	0,35	0,70
F	0,92	1,39	0,72	0,94	0,75	1,24	0,51	2,23
G	2,88	1,83	0,54	0,87	1,03	0,48	0,42	0,62
H	0,47	0,41	1,17	2,94	0,15	0,24	1,97	0,90
I	0,58	0,26	1,12	0,79	3,39	0,17	0,01	0,01
J	1,23	1,83	1,05	1,23	0,73	0,92	0,64	1,16
K	1,71	0,09	0,02	2,17	2,27	0,11	0,04	0,08
L	0,96	2,63	0,93	1,12	0,61	0,83	0,65	1,22
M,N	0,85	1,47	0,64	0,88	0,88	1,08	0,36	3,27
O	0,55	0,14	0,08	0,64	2,65	1,32	0,23	0,53
P	1,09	0,19	0,10	0,34	0,39	2,88	0,11	0,25
Q	1,13	0,88	0,92	1,09	1,61	0,82	0,71	0,85
R,S,T,U	1,03	1,90	0,99	1,19	0,65	0,87	0,69	1,30

Sumber: Diolah dari Data Primer, 2023.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa masing-masing kecamatan memiliki sektor basis yang berbeda satu sama lain. Sektor-sektor tersebut mempunyai potensi untuk dikembangkan dalam meningkatkan laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di wilayah kecamatan di Kota Palu.

Jika melihat dari sisi sektoral berdasarkan Tabel 5.5. di atas, maka diketahui bahwa:

1. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi sektor potensial/basis pada 4 kecamatan di Kota Palu. Nilai LQ tertinggi yaitu pada Kecamatan Tawaeli.
2. Sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor potensial/basis di 3 kecamatan di Kota Palu. Nilai LQ tertinggi yaitu pada Kecamatan Ulujadi.
3. Sektor industri pengolahan menjadi sektor potensial/basis di 2 kecamatan di Kota Palu. Nilai LQ tertinggi yaitu pada Kecamatan Palu Utara.
4. Sektor pengadaan listrik dan gas menjadi sektor potensial/basis di 3 kecamatan di Kota Palu. Nilai LQ tertinggi yaitu pada Kecamatan Ulujadi.

5. Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang menjadi sektor potensial/basis di 3 kecamatan di Kota Palu. Nilai LQ tertinggi yaitu pada Kecamatan Tatanga.
6. Sektor konstruksi menjadi sektor potensial/basis di 4 kecamatan di Kota Palu. Nilai LQ tertinggi yaitu pada Kecamatan Tawaeli.
7. Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor menjadi sektor potensial/basis di 3 kecamatan di Kota Palu. Nilai LQ tertinggi yaitu pada Kecamatan Palu Barat.
8. Sektor transportasi dan pergudangan menjadi sektor potensial/basis di 3 kecamatan di Kota Palu. Nilai LQ tertinggi yaitu pada Kecamatan Palu Selatan.
9. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sektor potensial/basis di 2 kecamatan di Kota Palu. Nilai LQ tertinggi yaitu pada Kecamatan Palu Timur.
10. Sektor informasi dan komunikasi menjadi sektor potensial/basis di 5 kecamatan di Kota Palu. Nilai LQ tertinggi yaitu pada Kecamatan Tatanga.
11. Sektor jasa keuangan dan asuransi menjadi sektor potensial/basis di 3 kecamatan di Kota Palu. Nilai LQ tertinggi yaitu pada Kecamatan Palu Timur.

12. Sektor real estate menjadi sektor potensial/basis di 4 kecamatan di Kota Palu. Nilai LQ tertinggi yaitu pada Kecamatan Tatanga.
13. Sektor jasa perusahaan menjadi sektor potensial/basis di 4 kecamatan di Kota Palu. Nilai LQ tertinggi yaitu pada Kecamatan Tatanga.
14. Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib menjadi sektor potensial/basis di 2 kecamatan di Kota Palu. Nilai LQ tertinggi yaitu pada Kecamatan Palu Timur.
15. Sektor jasa Pendidikan menjadi sektor potensial/basis di 2 kecamatan di Kota Palu. Nilai LQ tertinggi yaitu pada Kecamatan Mantikulore.
16. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial menjadi sektor potensial/basis di 3 kecamatan di Kota Palu. Nilai LQ tertinggi yaitu pada Kecamatan Palu Timur.
17. Sektor jasa lainnya menjadi sektor potensial/basis di 4 kecamatan di Kota Palu. Nilai LQ tertinggi yaitu pada Kecamatan Tatanga.

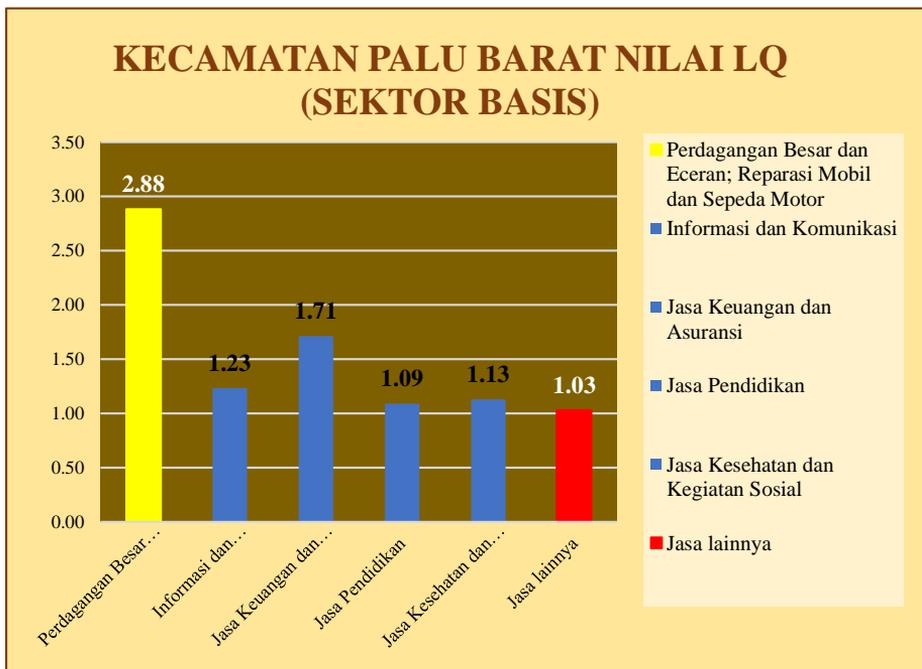
Berdasarkan analisis sektoral di atas, bahwa Sektor informasi dan komunikasi merupakan sektor yang paling banyak menjadi sektor basis di kecamatan di Kota Palu, yaitu 5 kecamatan. Selanjutnya sektor pertambangan dan penggalian di Kecamatan Ulujadi adalah sektor dengan nilai LQ tertinggi yaitu sebesar 6,57.

Berdasarkan uraian data sektoral di atas menunjukkan bahwa pengelolaan kebijakan ekonomi berdasarkan instrumen LQ maka kebijakan di Pemerintahan Kota Palu sebaiknya berdasar pada basis data kekuatan ekonomi masing-masing kecamatan agar kedepan tingkat pemerataan kecamatan di Kota Palu meningkat.

Berdasarkan Tabel 5.5. di atas, hasil perhitungan rata-rata LQ 8 kecamatan di Kota Palu dalam periode waktu 2018-2022 dapat diketahui bahwa:

a. Kecamatan Palu Barat

Sektor yang potensial yang menjadi basis terdapat 7 sektor, yakni sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; rela estate; jasa perusahaan; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan social. Sektor yang memberikan sumbangsi paling tinggi adalah pada sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Sementara yang memberikan sumbangsi sekor basis yang paling rendah dari sektor real estate (Gambar 5.1).

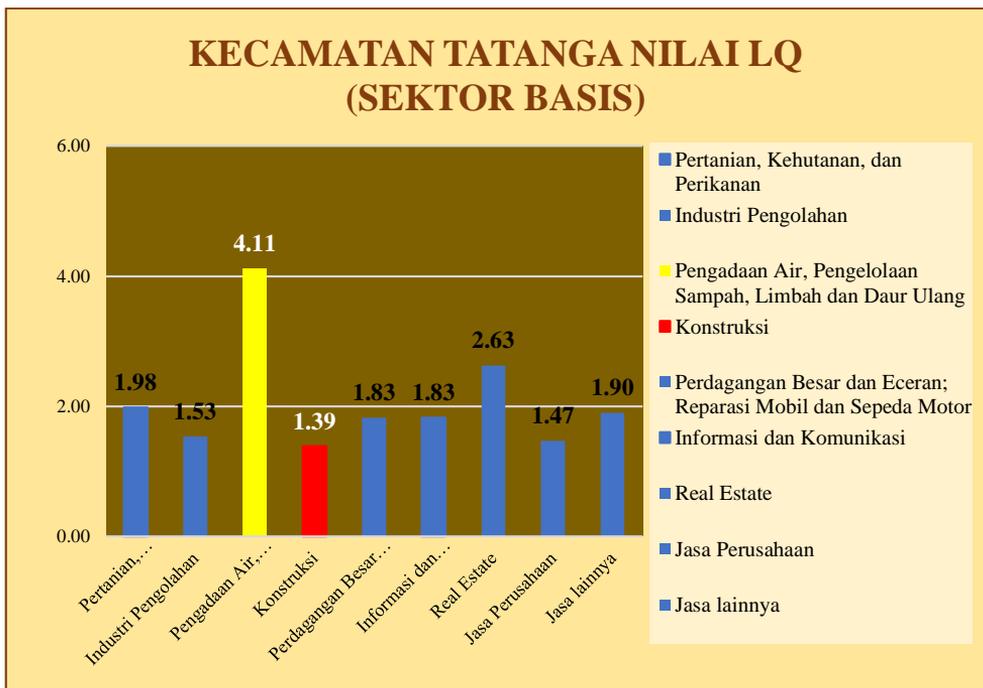


Sumber: Diolah dari Data Primer, 2023

Gambar 5.1. Sektor Basis Kecamatan Palu Barat Tahun 2018 - 2022

b. Kecamatan Tatanga

Sektor basis pada kecamatan Tatanga yang potensial adalah pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; pengadaan air, pengolahan sampah dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi motor dan mobil; informasi dan komunikasi; real estate; dan jasa perusahaan. Sektor yang memberikan kontribusi paling tinggi pada sektor pengadaan air, pengolahan sampah dan daur ulang; serta sektor basis paling rendah yakni pada sektor industri pengolahan (Gambar 5.2).



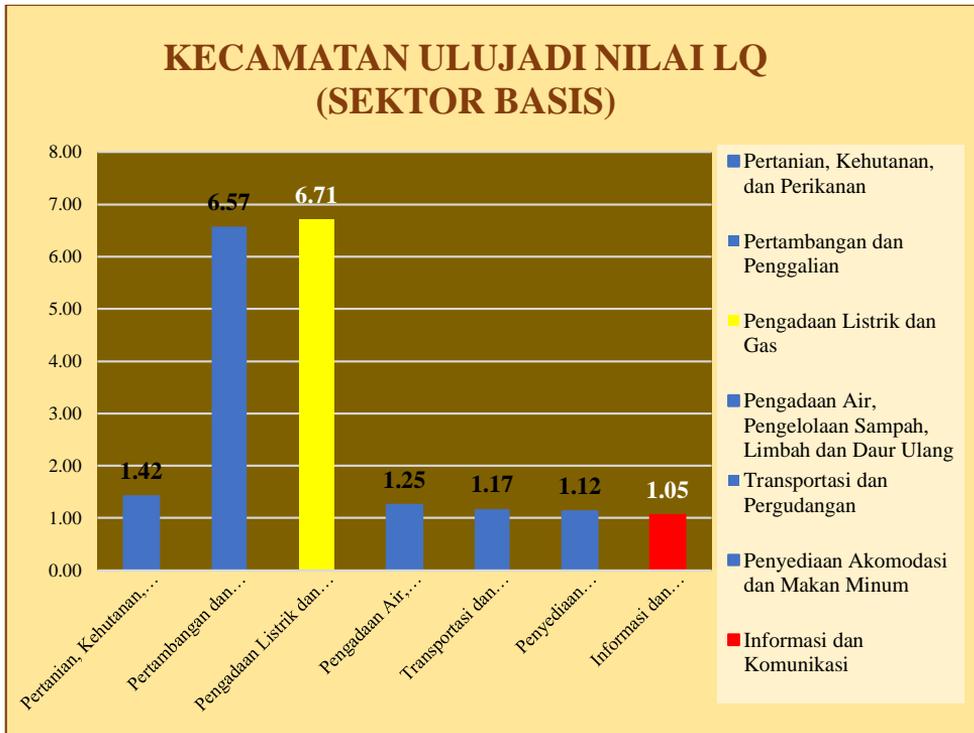
Sumber: Diolah dari Data Primer, 2023

Gambar 5.2. Sektor Basis Kecamatan Tatanga Tahun 2018 - 2022

c. Kecamatan Ulujadi

Sektor basis pada kecamatan ulujadi ada 7 sektor basis dan menjadi sektor potensial untuk dikembangkan, yakni sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makanan minuman; serta sektor informasi dan komunikasi. Sektor yang memberikan kontribusi paling tinggi dan paling potensial adalah pada sektor pertambangan dan

penggalian, sementara sektor basis paling kecil adalah pada sektor informasi dan komunikasi (Gambar 5.3).



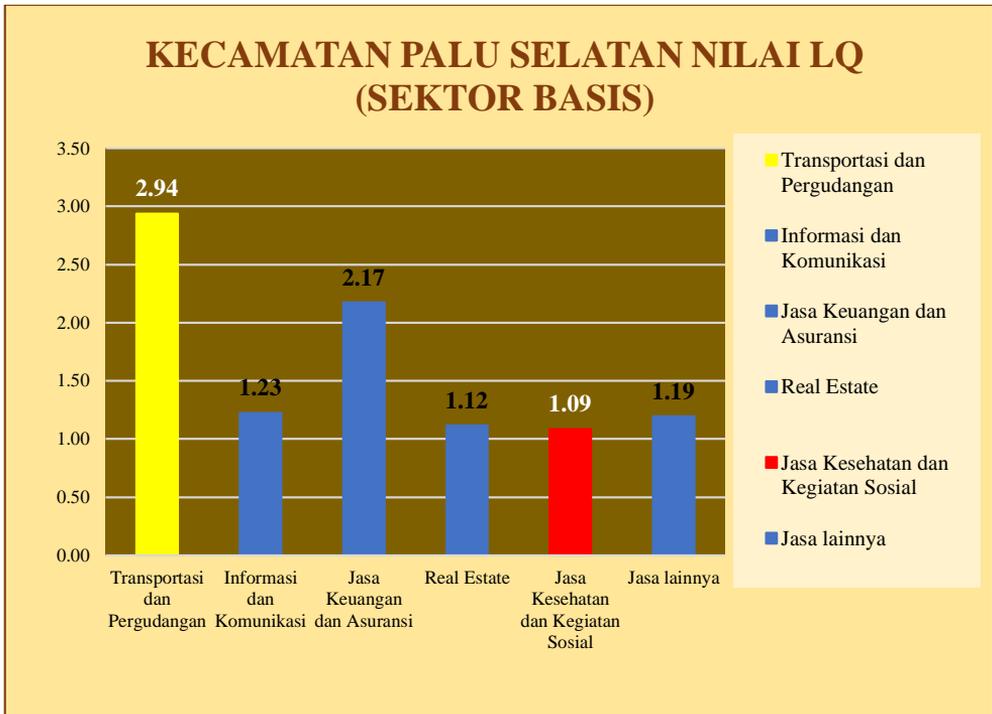
Sumber: Diolah dari Data Primer, 2023

Gambar 5.3. Sektor Basis Kecamatan Ulujadi Tahun 2018 - 2022

d. Kecamatan Palu Selatan

Kecamatan Palu Selatan memiliki 6 sektor Basis, yakni transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi, real estate; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta sektor jasa lainnya. Sektor basis paling tinggi dan potensial untuk dikembangkan adalah

transportasi dan perdagangan, sedangkan basis yang paling kecil dari sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (Gambar 5.4).



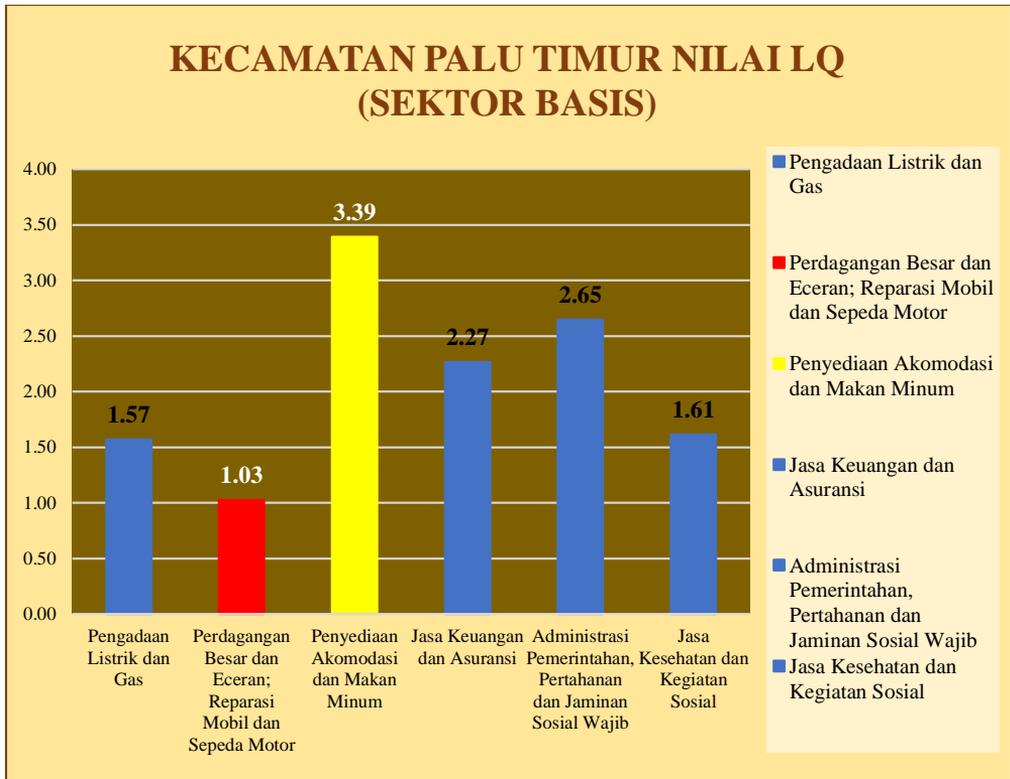
Sumber: Diolah dari Data Primer, 2023

Gambar 5.4. Sektor Basis Kecamatan Palu Selatan Tahun 2018 - 2022

e. Kecamatan Palu Timur

Kecamatan Palu Timur dapat berkembang ditunjang dari sektor basis pengadaan listrik dan gas; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor; penyediaan akomodasi dan makan minum; jasa keuangan dan asuransi; serta dari sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Sektor basis yang paling tinggi dari sektor penyediaan

akomodasi dan makan minum, sektor basis paling kecil dari perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (Gambar 5.5).



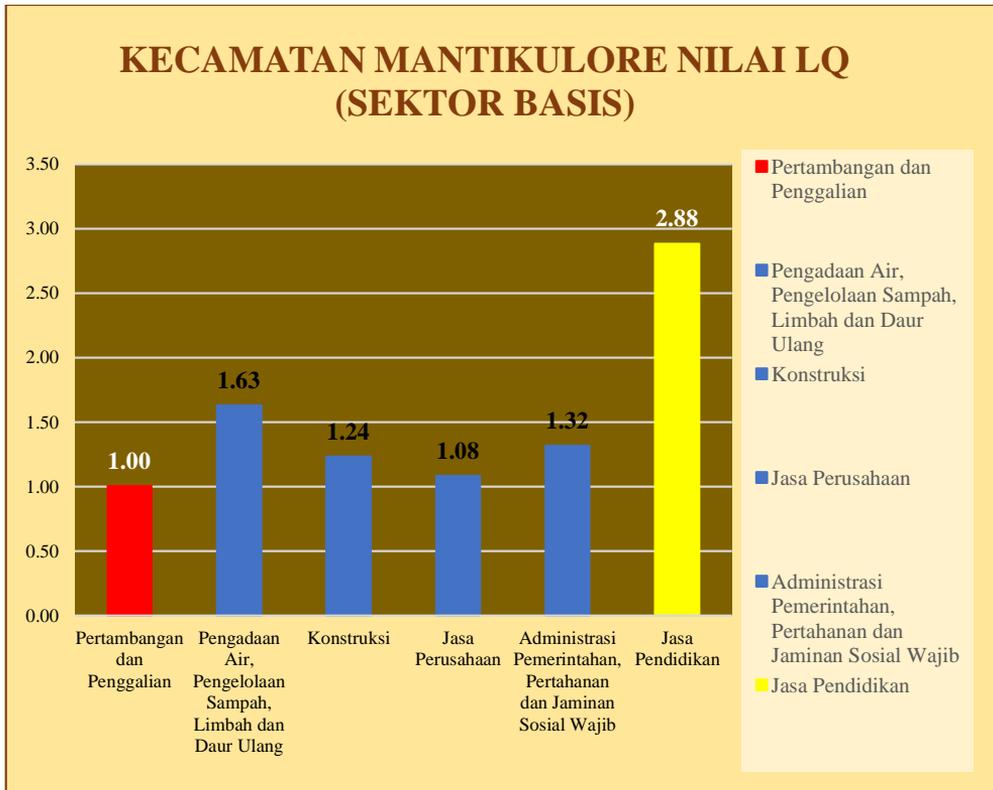
Sumber: Diolah dari Data Primer, 2023

Gambar 5.5. Sektor Basis Kecamatan Palu Timur Tahun 2018 - 2022

f. Kecamatan Mantikulore

Kecamatan Mantikulore memiliki sektor basis yang paling tinggi dari sektor jasa pendidikan. Sektor lainnya yang menunjang sektor basis adalah berkaitan dengan sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang; kontruksi, jasa perusahaan; dan administrasi pemerintah,

pertahanan dan jaminan sosial wajib. Secara lengkap tersaji pada grafik berikut.

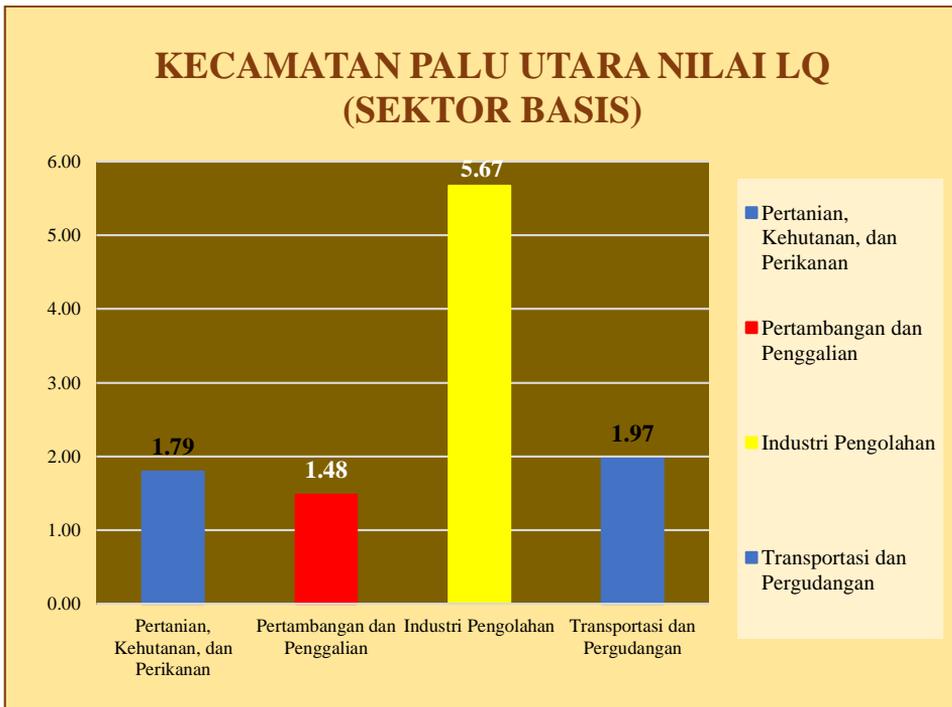


Sumber: Diolah dari Data Primer, 2023

Gambar 5.6. Sektor Basis Kecamatan Mantikulore Tahun 2018 - 2022

g. Kecamatan Palu Utara

Kecamatan Palu Utara memiliki sektor basis dari pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; sektor transportasi dan perdagangan. Sektor basis yang paling dominan memberikan kontribusi dari sektor industri pengolahan (Gambar 5.7).

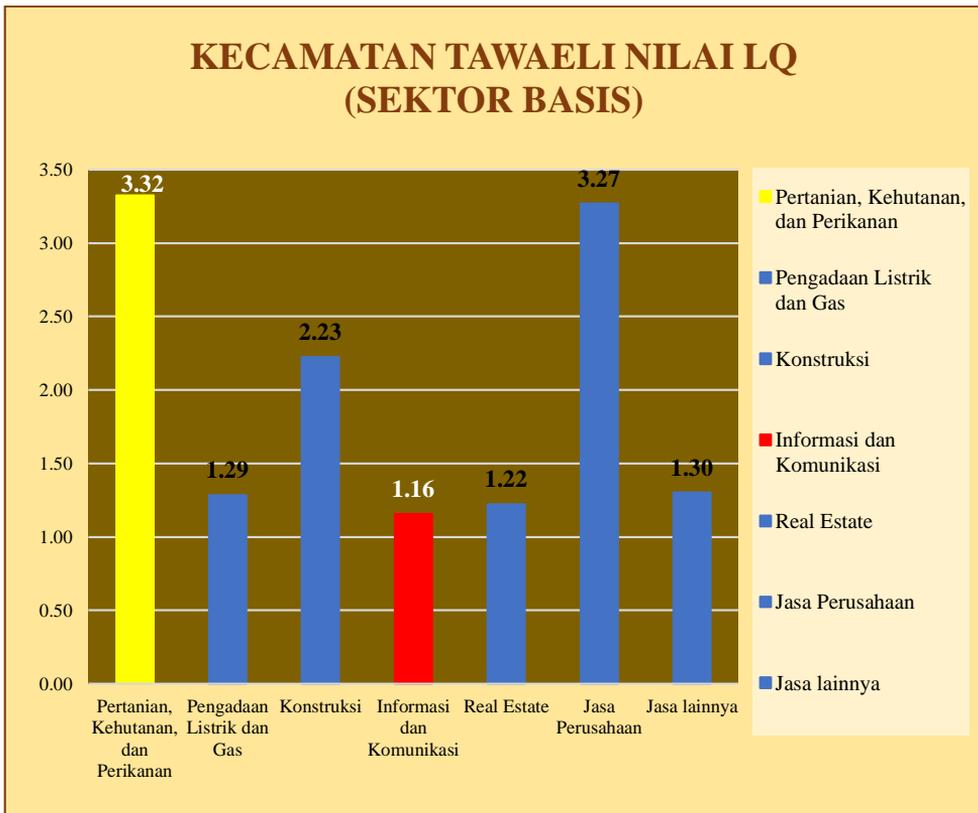


Sumber: Diolah dari Data Primer, 2023

Gambar 5.7. Sektor Basis Kecamatan Palu Utara Tahun 2018 - 2022

h. Kecamatan Tawaeli

Kecamatan Tawaeli merupakan kecamatan yang paling banyak memiliki sektor basis yang potensial untuk dikembangkan, terdiri dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; pengadaan listrik dan gas; konstruksi; transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; real estate; jasa perusahaan; dan sektor jasa lainnya. Sektor basis paling tinggi dari pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor basis paling rendah dari sektor transportasi dan pergudangan (Gambar 5.8).



Sumber: Diolah dari Data Primer, 2023

Gambar 5.8. Sektor Basis Kecamatan Tawaeli Tahun 2018 - 2022

5.2.2. *Shift Share* (SS)

Analisis *Shift-Share* digunakan untuk mengetahui perubahan struktur/kinerja ekonomi daerah (Kecamatan di Kota Palu) terhadap struktur ekonomi yang lebih tinggi (Kota Palu) sebagai referensi. Tabel 5.6. menunjukkan perhitungan N_{ij} yaitu tambahan produksi masing-masing sektor ekonomi di tiap Kecamatan seandainya pertumbuhan tiap sektor ekonomi Kecamatan di Kota Palu sama dengan pertumbuhan Kota Palu.

Tabel 5.6. Perhitungan Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu (N_{ij}) Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

Sektor	Kecamatan			
	Palu Barat	Tatanga	Ulujadi	Palu Selatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	10.087,75	36.395,58	28.292,53	10.470,75
B	95,94	1.425,78	214.768,66	3.706,25
C	34.006,48	41.811,83	12.457,47	37.841,86
D	1.079,24	31,84	3.314,21	34,42
E	832,31	5.345,18	2.160,69	1.663,95
F	79.179,45	96.606,93	34.863,44	222.683,55
G	136.699,71	64.206,60	27.775,06	125.921,85
H	24.674,24	15.421,57	59.280,44	294.291,13
I	6.743,01	327,28	13.374,80	8.176,82
J	84.707,19	67.308,64	48.896,63	97.566,58
K	61.470,62	2.083,21	694,40	106.340,16
L	17.571,71	25.640,00	11.947,94	25.928,89
M,N	7.102,19	8.841,90	3.454,64	11.002,36
O	55.280,66	6.639,18	5.503,99	93.086,16
P	62.323,53	6.014,24	4.098,53	24.043,28
Q	16.208,38	10.944,54	18.713,04	29.271,61
R,S,T,U	7.174,20	7.457,27	4.878,12	10.586,29
Total	605.236,60	396.501,58	494.474,60	1.102.615,91

Sumber: Diolah dari Data Primer, 2023.

Lanjutan Tabel 5.6. Perhitungan Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu (N_{ij}) Tahun 2018 - 2022 (Juta Rupiah)

Sektor	Kecamatan			
	Palu Timur	Mantikulo	Palu Utara	Tawaeli
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	4.052,34	43.057,36	51.465,40	58.950,89
B	0,00	82.200,29	63.252,67	95,94
C	28.507,76	50.648,45	181.680,46	6.047,04
D	2.162,40	50,82	14,83	992,28
E	274,77	6.040,18	488,75	480,64
F	56.358,74	298.007,76	32.931,41	116.597,23
G	116.615,76	64.247,36	24.680,59	15.752,62
H	14.462,44	28.762,45	100.248,59	28.393,90
I	29.643,59	4.194,35	38,92	38,60
J	40.737,93	100.573,32	34.968,00	27.117,33
K	150.165,31	9.591,79	1.388,81	1.388,81
L	16.895,53	27.547,02	8.762,00	8.128,68
M,N	16.728,47	14.169,98	3.894,65	1.230,34
O	409.152,54	207.190,66	16.752,76	21.912,74
P	33.657,86	320.879,74	4.469,66	4.809,79
Q	52.085,44	33.276,72	10.506,52	5.681,19
R,S,T,U	6.898,13	11.246,94	3.577,36	3.318,79
Total	978.399,01	1.301.685,18	539.121,37	300.936,83

Sumber: Diolah dari Data Primer, 2023.

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5.6. di atas, komponen pengaruh pertumbuhan ekonomi Kota Palu menunjukkan bahwa rata-rata sektor dalam PDRB kecamatan memiliki nilai positif ($N_{ij} > 0$). Sektor yang memiliki nilai N_{ij} positif menunjukkan bahwa sektor ekonomi kecamatan tumbuh lebih cepat apabila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Palu.

Nilai N_{ij} terbesar yaitu Sektor Administrasi Pemerintahan pada Kecamatan Palu Timur sebesar 409.152,54 diikuti Sektor Jasa Pendidikan pada Kecamatan Mantikulore sebesar 320.879,74. Sektor dengan nilai N_{ij} yang besar merupakan sektor yang sangat penting untuk dikembangkan dan diperhatikan agar memberikan dampak peningkatan pertumbuhan ekonomi kecamatan. Selanjutnya nilai N_{ij} terkecil yaitu sektor pertambangan dan penggalian pada Kecamatan Palu Timur yaitu sebesar 0,0. Nilai rata-rata N_{ij} kecamatan yang terbesar adalah sektor konstruksi yaitu sebesar 117.153,56, artinya secara level Kota Palu sektor ini harus dikembangkan dan diperhatikan agar pendapatan Kota Palu semakin meningkat. Intervensi kebijakan berdasarkan data yang dihasilkan dengan pendekatan Shift Share sangatlah penting dengan memfokuskan perhatian pada nilai N_{ij} yang terbesar dan terkecil. Nilai N_{ij} terbesar mengisyaratkan bahwa sektor

tersebut untuk dikembangkan dengan tidak mengabaikan nilai N_{ij} yang kecil agar dibuatkan formulasi kebijakan khusus agar dapat menjadi sektor yang berkembang dimasa mendatang. Tabel 5.7. berisi nilai *Proportional Shift* (M_{ij}) yaitu besarnya pengaruh penyimpangan regional neto pada masing-masing sektor ekonomi kecamatan di Kota Palu.

Tabel 5.7. Perhitungan *Proportional Shift* (M_{ij}) Tahun 2018 - 2022 (Juta Rupiah)

Sektor	Kecamatan			
	Palu Barat	Tatanga	Ulujuadi	Palu Selatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	(4.350,63)	(15.696,62)	(12.201,95)	(4.515,81)
B	(1,54)	(22,90)	(3.449,72)	(59,53)
C	(13.752,40)	(16.908,93)	(5.037,87)	(15.303,45)
D	(66,91)	(1,97)	(205,47)	(2,13)
E	(172,45)	(1.107,49)	(447,68)	(344,76)
F	42.930,18	52.379,16	18.902,55	120.736,45
G	78.014,58	36.642,73	15.851,24	71.863,65
H	(24.662,06)	(15.413,96)	(59.251,17)	(294.145,82)
I	(3.629,71)	(176,17)	(7.199,56)	(4.401,53)
J	39.206,08	31.153,29	22.631,43	45.157,95
K	1.345,21	45,59	15,20	2.327,12
L	(3.666,88)	(5.350,58)	(2.493,31)	(5.410,86)
M,N	(1.578,39)	(1.965,02)	(767,76)	(2.445,16)
O	(2.834,58)	(340,43)	(282,22)	(4.773,10)
P	(32.121,45)	(3.099,73)	(2.112,37)	(12.391,87)
Q	12.068,61	8.149,21	13.933,56	21.795,38
R,S,T,U	(1.553,76)	(1.615,06)	(1.056,48)	(2.292,73)

Sumber: Diolah dari Data Primer, 2023.

Lanjutan Tabel 5.7. Perhitungan *Proportional Shift* (M_{ij})
Tahun 2018 - 2022 (Juta Rupiah)

Sektor	Kecamatan			
	Palu Timur	Mantikulo	Palu Utara	Tawaeli
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	(1.747,68)	(18.569,70)	(22.195,91)	(25.424,24)
B	0,00	(1.320,34)	(1.015,99)	(1,54)
C	(11.528,69)	(20.482,50)	(73.472,55)	(2.445,45)
D	(134,06)	(3,15)	(0,92)	(61,52)
E	(56,93)	(1.251,49)	(101,27)	(99,59)
F	30.557,06	161.576,36	17.855,03	63.217,67
G	66.552,66	36.666,00	14.085,22	8.990,03
H	(14.455,30)	(28.748,24)	(100.199,09)	(28.379,88)
I	(15.956,94)	(2.257,79)	(20,95)	(20,78)
J	18.855,24	46.549,59	16.184,67	12.551,05
K	3.286,19	209,90	30,39	30,39
L	(3.525,77)	(5.748,54)	(1.828,46)	(1.696,30)
M,N	(3.717,73)	(3.149,14)	(865,55)	(273,43)
O	(20.979,76)	(10.623,94)	(859,02)	(1.123,60)
P	(17.347,21)	(165.380,90)	(2.303,66)	(2.478,96)
Q	38.782,34	24.777,54	7.823,06	4.230,16
R,S,T,U	(1.493,97)	(2.435,81)	(774,77)	(718,77)

Sumber: Diolah dari Data Primer, 2023.

Berdasarkan hasil analisis *Shift Share* di atas dengan komponen pergeseran proposional (*Proportional Shift*) terdapat 12 sektor yang bernilai negative hampir di seluruh kecamatan Kota Palu. Nilai negatif tersebut

mengindikasikan adanya perlambatan pertumbuhan dibanding proporsi pertumbuhan ekonomi Kota Palu.

Nilai M_{ij} terbesar yaitu sektor konstruksi di Kecamatan Mantikulore sebesar 161.576,36 diikuti sektor konstruksi di Kecamatan Palu Timur sebesar 120.736,45. Sektor dengan nilai M_{ij} yang besar merupakan sektor yang sangat penting untuk terus dikembangkan dan diperhatikan agar memberikan dampak peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Palu. Selanjutnya nilai M_{ij} terkecil yaitu sektor transportasi dan pergudangan di Kecamatan Palu Selatan yaitu sebesar (-294.145,82). Sektor dengan nilai M_{ij} rendah berarti sektor tersebut mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding sektor sejenis di Kota Palu.

Tabel 5.8. yang berisi nilai pergeseran diferensial menunjukkan hasil perhitungan keunggulan kompetitif tiap sektor ekonomi kecamatan di Kota Palu tahun 2018-2022. Pergeseran diferensial (C_{ij}) merupakan besarnya pengaruh pergeseran regional neto pada tiap sektor ekonomi kecamatan yang diakibatkan oleh sektor-sektor tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat di daerah yang bersangkutan dari pada tingkat regional (Kota Palu) yang disebabkan adanya keuntungan atau kelebihan tertentu dari daerah tersebut.

Tabel 5.8. Perhitungan Pergeseran Diferensial (C_{ij}) Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

Sektor	Kecamatan			
	Palu Barat	Tatanga	Ulujadi	Palu Selatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	13.903,05	3.093,77	25.977,83	78.489,44
B	(128,46)	(1.909,09)	35.242,42	(5.442,89)
C	(33.102,50)	23.605,24	(2.845,10)	(54.479,86)
D	(5.113,68)	0,00	8.600,68	0,00
E	(1.751,38)	(1.293,83)	(1.171,64)	862,60
F	123.825,35	(136.782,39)	194.728,29	(396.379,83)
G	379.257,95	72.005,93	1.066,62	(318.303,76)
H	77.636,63	5.457,29	18.149,15	(19.672,18)
I	(3.319,24)	3.910,33	(58.391,67)	7.035,09
J	(109.349,76)	(12.386,03)	(8.824,46)	(7.867,25)
K	50.947,02	594,51	(718,63)	72.699,86
L	(5.695,90)	10.915,28	1.977,62	(2.456,97)
M,N	(2.044,78)	(27.971,90)	4.206,03	(6.560,70)
O	(41.407,31)	29.333,00	16.594,82	(86.460,03)
P	3.661,84	3.448,51	1.332,33	10.577,99
Q	44.051,54	(620,22)	(37.961,52)	2.838,64
R,S,T,U	(1.494,53)	1.477,58	1.430,52	282,11

Sumber: Diolah dari Data Primer, 2023.

Lanjutan Tabel 5.8. Perhitungan Pergeseran Diferensial (C_{ij}) Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

Sektor	Kecamatan			
	Palu Timur	Mantikulore	Palu Utara	Tawaali
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	26.993,32	37.787,60	(55.227,58)	(131.017,42)
B	-	53.177,06	(81.559,91)	620,87
C	(82.412,44)	(47.876,64)	195.393,29	1.718,01
D	(230,22)	0,00	0,00	(3.256,78)
E	(340,06)	2.886,19	405,61	402,52
F	591.542,01	(362.987,27)	127.967,67	(141.913,83)
G	(96.622,79)	(17.719,00)	(20.128,99)	444,04
H	(1.164,17)	6.252,32	(16.083,81)	(70.575,25)
I	67.238,37	(16.389,63)	(26,62)	(56,63)
J	150.437,55	30.755,09	(38.578,06)	(4.187,07)
K	(111.588,15)	(9.060,08)	(1.437,26)	(1.437,26)
L	(7.712,05)	4.429,55	(649,57)	(807,96)
M,N	(15.162,33)	17.514,00	(493,59)	30.513,26
O	(164.431,00)	254.913,46	29.127,49	(37.670,44)
P	(399,21)	(25.618,20)	3.738,58	3.258,16
Q	(17.418,96)	(4.064,43)	6.401,55	6.773,41
R,S,T,U	(2.371,85)	432,58	170,90	72,68

Sumber: Diolah dari Data Primer, 2023.

Nilai pergeseran differensial (C_{ij}) kecamatan di Kota Palu tahun 2018-2022 bervariasi dengan nilai positif dan negatif. Sektor yang memiliki nilai C_{ij} positif menunjukkan bahwa sektor ekonomi provinsi di Kota Palu memiliki keuntungan dan kelebihan lokasional. Tabel 5.9. berisi nilai analisis *Shift Share* (perubahan sektor ekonomi) kecamatan di Kota Palu

tahun 2018-2022. *Shift Share* merupakan perubahan output tiap sektor ekonomi kecamatan yang diakibatkan adanya pengaruh pertumbuhan di tingkat nasional/national growth effect (N_{ij}). Pengaruh pergeseran proporsi/proportional shift (M_{ij}) dan pengaruh pergeseran diferensial/differential shift (C_{ij}).

Tabel 5.9. Hasil Analisis *Shift Share* (D_{ij}) Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

Sektor	Kecamatan			
	Palu Barat	Tatanga	Ulujadi	Palu Selatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	19.640,17	23.792,72	42.068,41	84.444,39
B	(34,06)	(506,21)	246.561,36	(1.796,17)
C	(12.848,42)	48.508,14	4.574,50	(31.941,45)
D	(4.101,34)	29,86	11.709,43	32,29
E	(1.091,52)	2.943,86	541,37	2.181,79
F	245.934,98	12.203,70	248.494,29	(52.959,83)
G	593.972,24	172.855,26	44.692,92	(120.518,27)
H	77.648,82	5.464,91	18.178,43	(19.526,87)
I	(205,95)	4.061,44	(52.216,44)	10.810,38
J	14.563,50	86.075,89	62.703,61	134.857,27
K	113.762,86	2.723,30	(9,03)	181.367,15
L	8208,92	31.204,71	11.432,25	18.061,05
M,N	3.479,02	(21.095,02)	6.892,91	1.996,49
O	11.038,77	35.631,75	21.816,59	1.853,03
P	33.863,92	6.363,02	3.318,49	22.229,40
Q	72.328,52	18.473,53	(5.314,91)	53.905,63
R,S,T,U	4.125,91	7.319,80	5.252,16	8.575,67
Total	1.180.286,35	436.050,67	670.696,32	293.571,95

Sumber: Diolah dari Data Primer, 2023.

Lanjutan Tabel 5.9. Hasil Analisis *Shift Share* (D_{ij}) Tahun 2018-2022
(Juta Rupiah)

Sektor	Kecamatan			
	Palu Timur	Mantuku lore	Palu Utara	Tawaeli
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	29.297,97	62.275,26	(25.958,09)	(97.490,77)
B	-	134.057,01	(19.323,23)	715,27
C	(65.433,37)	(17.710,69)	303.601,19	5.319,59
D	1.798,11	47,66	13,91	(2.326,02)
E	(122,21)	7.674,87	793,09	783,58
F	678.457,81	96.596,85	178.754,10	37.901,08
G	86.545,64	83.194,36	18.636,83	25.186,69
H	(1.157,03)	6.266,53	(16.034,31)	(70.561,23)
I	80.925,02	(14.453,07)	(8,65)	(38,80)
J	210.030,71	177.878,00	12.574,62	35.481,31
K	41.863,34	741,61	(18,07)	(18,07)
L	5.657,70	26.228,03	6.283,97	5.624,42
M,N	(2.151,59)	28.534,84	2.535,51	31.470,17
O	223.741,78	451.480,19	45.021,23	(16.881,30)
P	15.911,44	129.880,64	5.904,59	5.588,99
Q	73.448,82	53.989,82	24.731,12	16.684,76
R,S,T,U	3.032,32	9.243,71	2.973,50	2.672,70
Total	1.381.846,47	1.235.925,62	540.481,33	(19.887,63)

Sumber: Diolah dari Data Primer, 2023.

Berdasarkan Tabel 5.9 dapat diketahui bahwa ada beberapa sektor di kecamatan tertentu yang memiliki nilai *Shift Share* yang negatif. Hal ini berarti bahwa kontribusi sektor-sektor tersebut mengalami penurunan. Namun secara keseluruhan, sebagian besar sektor yang ada di kecamatan

memiliki nilai pertumbuhan riil positif. Sesuai dengan penelitian (Purba, 2020), apabila nilai D_{ij} menunjukkan nilai positif, maka terjadi peningkatan kinerja ekonomi dari sektor tersebut.

Tabel 5.10. Rekap Hasil Analisis *Shift Share* (N_{ij} , M_{ij} , C_{ij} , dan D_{ij}) untuk 3 (tiga) sektor/kategori nilai tertinggi Tahun 2018-2022

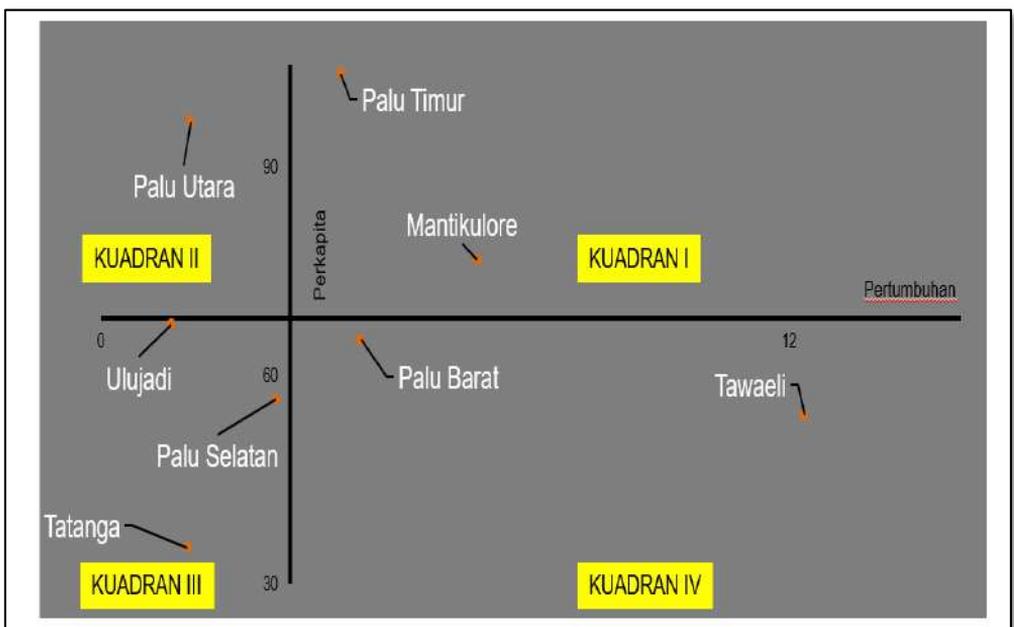
Kecamatan	N_{ij} (Nilai)	M_{ij} (Sektor)	C_{ij} (Sektor)	D_{ij} (Nilai)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Palu Barat	605.236,60	F, G, J	F,G, H	1.180.286,35
Tatanga	396.501,58	F, G, J	G, C, L	436.050,67
Ulujadi	494.474,60	F, H, J	B, A, F	670.696,32
Palu Selatan	1.102.615,91	F, G, H	K, A, P	293.571,95
Palu Timur	978.399,01	F, G, Q	F, J, I	1.381.846,47
Mantikulo	1.301.685,18	F, J, P	Q,B,A	1.235.925,62
Palu Utara	539.121,37	H,C,A	C, F,O	540.481,33
Tawaeli	300.936,83	F, H, A	F, O, M,N	(19.887,63)

Sumber: Diolah dari Data Primer, 2023.

5.2.3. Tipologi Klassen

Gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing kecamatan di Kota Palu diketehauui dengan menggunakan Tipologi

Klassen. Analisis Tipologi Klassen dengan pendekatan wilayah didasarkan pada dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi (laju pertumbuhan PDRB) dan pendapatan (PDRB per kapita). Rata-rata pertumbuhan ekonomi ditentukan sebagai sumbu horizontal (ordinat Y) dan rata-rata pendapatan perkapita sebagai sumbu vertikal (absis X). Melalui analisis ini diperoleh empat karakteristik pola dan struktur pertumbuhan ekonomi yang berbeda, yaitu: Kuadran I daerah maju dan pertumbuhan cepat, Kuadran II daerah maju tapi tertekan, Kuadran III daerah relatif tertinggal dan Kuadran IV daerah berkembang (Gambar 5.9).



Sumber: Diolah dari Data Primer, 2023.

Gambar 5.9. Tipologi Kecamatan di Kota Palu Tahun 2018-2022

Hasil pengklasifikasian 8 kecamatan di Kota Palu berdasarkan Tipologi Klassen dengan pendekatan wilayah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kuadran I: Kecamatan cepat maju dan dan cepat tumbuh, merupakan kecamatan yang tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapitanya lebih tinggi dibanding rata-rata wilayah, dimana yang termasuk dalam kuadran ini yaitu: Kecamatan Palu Timur dan Kecamatan Mantikulore.
- 2) Kuadran II: Kecamatan maju namun tertekan, merupakan daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan rata-rata Kota Palu, dimana yang termasuk dalam kuadran ini yaitu: Kecamatan Palu Utara.
- 3) Kuadran III: Kecamatan relatif tertinggal, merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita lebih rendah daripada rata-rata Kota Palu, dimana yang termasuk dalam kuadran ini yaitu: Kecamatan Ulujadi, Kecamatan Palu Selatan, dan Kecamatan Tatanga.
- 4) Kuadran IV: Kecamatan berkembang cepat, merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, namun tingkat pendapatan per kapitanya lebih rendah dibanding rata-rata Kota Palu, dimana yang

termasuk dalam kuadran ini yaitu: Kecamatan Palu Barat dan Kecamatan Tawaeli.

Tabel 5.11. Kesimpulan Kriteria Kecamatan dari Rata-rata Laju Pertumbuhan dan Rata-rata PDRB Perkapita Tahun 2018 - 2022

Kuadran	Kriteria	Kecamatan	Rata Pertum- buan (%)	Rata Perkapita (Juta Rupiah)
			Palu=3,30	Palu=68,39
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibanding rata-rata kabupaten/kota	Mantikulore	6,56	76,74
		Palu Timur	4,18	103,66
2	Daerah yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi. tetapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibanding dengan rata-rata kabupaten/kota.	Palu Utara	1,56	96,76
3	Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita yang lebih rendah dibanding dengan rata-rata kabupaten/kota	Ulujadi	1,23	67,49
		Palu Selatan	3,06	56,67
		Tatanga	1,51	35,28
4	Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota	Palu Barat	4,53	65,24
		Tawaeli	12,26	54,39

Sumber: Diolah dari Data Primer, 2023.

5.3 Analisis Ketimpangan Pendapatan antar Kecamatan

Analisis indeks ketimpangan Williamson dan Indeks Entropi Theil digunakan untuk memberikan gambaran kondisi ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kota Palu seperti terlihat pada Tabel 5.12. Tabel 5.12 juga disajikan nilai Indeks Gini Ratio daerah perkotaan (dikutip dari Publikasi BPS Provinsi Sulawesi Tengah).

Tabel 5.12. Indeks Wiliamson, Indeks Entropi Theil, dan Indeks Gini Kota Palu Tahun 2018 - 2022

Tahun	Indeks Williamson	Indeks Entropi Theil	Indeks Gini
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	0,262	0,066	-
2019	0,290	0,037	0,357
2020	0,341	0,126	0,304
2021	0,312	0,082	0,304
2022	0,316	0,091	0,308
Rata-Rata	0,304	0,080	0,318

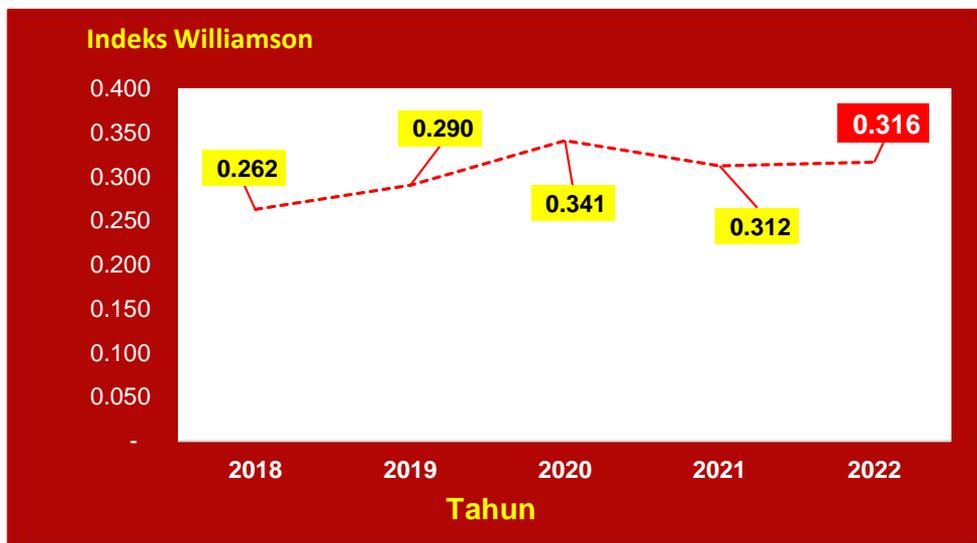
Sumber: Diolah dari Data Primer, 2023.

5.3.1. Indeks Williamson

Indeks Williamson digunakan untuk menentukan besarnya ketimpangan pendapatan antar wilayah. Nilai Indeks Williamson berkisar 0

hingga 1. Semakin besar nilai Indeks Williamson maka ketimpangan pendapatan antar wilayah semakin besar demikian pula sebaliknya.

Berdasarkan Tabel 5.10 di atas, diketahui bahwa rata-rata ketimpangan PDRB perkapita antar kecamatan di Kota Palu selama periode 2018-2022 sebesar 0.297. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa selama periode 2018-2022 ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kota Palu yang tergolong kecil. Nilai ini masih sepadan dengan nilai ketimpangan Indeks Gini Ratio di wilayah Kota Palu dengan kategori rendah. Perkembangan Indeks Williamson Kota Palu Tahun 2018-2022 terlihat pada Gambar 5.10.



Sumber: Diolah dari Data Primer, 2023.

Gambar 5.10. Perkembangan Indeks Williamson Kota Palu Tahun 2018 - 2022

Gambar 5.10. memperlihatkan bahwa perkembangan ketimpangan antar kecamatan di Kota Palu berfluktuasi dari tahun 2018 hingga 2022. Indeks Williamson Kota Palu pada tahun 2018 sebesar 0,262. Selanjutnya mengalami penurunan hingga tahun 2019 menjadi 0,290 dan pada tahun berikutnya nilai Indeks Williamson naik menjadi 0,341 dan tahun 2022 melandai menjadi 0,316. Gambaran perkembangan nilai Indeks Williamson ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kota Palu masih dalam kategori rendah.

5.3.2. Indeks Entropi Theil

Tabel 5.10 terlihat bahwa tingkat ketimpangan pendapatan antar kecamatan Tahun 2018-2022 di Kota Palu dengan menggunakan Indeks Entropi Theil menunjukkan bahwa pada awalnya ketimpangan pendapatan tinggi, yaitu tahun 2018 sebesar 0,066, kemudian turun secara berkala di tahun berikutnya sebesar 0,037. Selanjutnya hingga sebesar 0,126 Tahun 2020. Hal ini sepola dengan trend hasil analisis Indeks Wiliamson dan hasil Indeks Gini Ratio. Namun nilai Indeks Entropi Theil yang relatif kecil menggambarkan ketimpangan yang relatif kecil pula, berbeda dengan Indeks Wiliamson dan Indeks Gini yang memiliki nilai yang besar.

Perkembangan Indeks Entropi Theil Kota Palu Tahun 2018-2022

terlihat pada Gambar 5.11.



Sumber: Diolah dari Data Primer, 2023.

Gambar 5.11. Perkembangan Indeks Entropi Theil di Kota Palu Tahun 2018-2022

INDIKATOR KETIMPANGAN KOTA PALU 2018-2022

Indeks Williamson mengukur besarnya ketimpangan pendapatan antar wilayah.

Indeks
Williamson



Indeks
Entropi Theil

Indeks Entropi Theil juga mengukur besarnya ketimpangan pendapatan antar wilayah.



Mengetahui ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran sebagai proksi pendapatan penduduk.

Indeks
Gini



*Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan 1 berarti ketimpangan sempurna.

BAB VI

IMPLIKASI KEBIJAKAN

6.1 Kesimpulan

1. Laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2018 - 2022 menunjukkan trend yang positif walaupun pada Tahun 2020 mengalami penurunan akibat fenomena covid-19, namun angka pertumbuhan ekonomi kota semakin membaik pada Tahun 2021 sebesar 5,97 dan melambat pada Tahun 2022 sebesar 4,32 persen, hanya Kecamatan Palu Barat dan Tatanga yang menunjukkan pertumbuhan negative pada Tahun 2022. Tingkat pertumbuhan tertinggi terjadi pada Kecamatan Tawaeli sebesar 13,46.
2. Berdasar analisis *Location Quotient* (LQ) yang digunakan untuk mengetahui sektor potensial di suatu wilayah, berdasarkan hasil LQ sektor ekonomi yang menjadi unggulan atau basis dari masing-masing kecamatan terlihat beragam. Sektor informasi dan komunikasi merupakan sektor yang paling banyak menjadi sektor basis di kecamatan di Kota Palu, selanjutnya sektor pertambangan dan penggalian di Kecamatan Ulujadi adalah sektor dengan nilai LQ tertinggi yaitu sebesar 6,57.

3. Analisis *Shift-Share* yang digunakan untuk mengetahui perubahan struktur/kinerja ekonomi daerah dalam hal ini wilayah kecamatan terhadap struktur ekonomi Kota Palu menunjukkan bahwa rata-rata sektor dalam PDRB kecamatan memiliki nilai positif, hal ini mengindikasikan bahwa sektor ekonomi kecamatan tumbuh lebih cepat apabila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Palu. Nilai rata-rata N_{ij} kecamatan yang terbesar adalah sektor konstruksi yaitu sebesar 117,153.56. Komponen pergeseran proposional (*Proportional Shift*) terdapat 12 sektor yang bernilai negative hampir di seluruh kecamatan Kota Palu. Nilai negatif tersebut mengindikasikan adanya perlambatan pertumbuhan dibanding proporsi pertumbuhan ekonomi Kota Palu.
4. Hasil analisis Analisis Tipologi Klassen dengan pendekatan wilayah pada di Kota Palu Tahun 2023 yang didasarkan pada dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi (laju pertumbuhan PDRB) dan pendapatan (PDRB per kapita) menunjukkan bahwa kelompok Kecamatan cepat maju dan dan cepat tumbuh tetap diisi oleh Kecamatan Mantikulore. Tahun ini kondisi ekonomi Kecamatan Palu Timur lebih baik dibandingkan tahun lalu yaitu masuk kuadran I, menunjukkan bahwa pendapatan perkapitanya pada tahun ini sudah

lebih tinggi dari rata-rata Kota Palu. Kecamatan Palu Utara tetap masuk dalam kategori kecamatan maju namun tertekan, yaitu daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan rata-rata Kota Palu. Kecamatan Ulujadi yang tahun lalu masuk dalam kuadran kecamatan maju namun tertekan, saat ini masuk dalam kuadran kecamatan relatif tertinggal atau daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita lebih rendah daripada rata-rata Kota Palu. Selain Kecamatan Ulujadi, Kecamatan Palu Selatan dan Kecamatan Tatanga sejak Tahun 2022 telah masuk dalam kuadran Kecamatan relatif tertinggal. Kecamatan Palu Barat yang tahun lalu masuk dalam kategori Kecamatan Relatif tertinggal tahun ini telah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata Kota Palu dan masuk dalam kuadran kecamatan berkembang cepat. Kecamatan Tawaeli sejak Tahun 2022 tetap masuk dalam kategori kecamatan berkembang cepat.

5. Analisis Ketimpangan Wiliamson menunjukkan Nilai ketimpangan Wiliamson antar kecamatan selama 5 tahun terakhir mengalami fruktiasi, rata-rata ketimpangan PDRB perkapita antar kecamatan di Kota Palu selama periode 2018-2022 sebesar 0.297. Nilai tersebut

dapat diartikan bahwa selama periode 2018-2022 ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kota Palu yang tergolong rendah, Indeks Williamson tergolong rendah, karena berada di bawah 0,35. Hasil analisis Entropi Theil yang menunjukkan Pola yang sama dengan analisis Wiliamson.

6.2 Rekomendasi

1. Berdasarkan Analisis Tipologi Klassen yang menunjukkan dimana posisi tiap kecamatan berdasarkan pertumbuhan ekonomi (laju pertumbuhan PDRB) dan pendapatan (PDRB per kapita), maka pemerintah Kota Palu dalam upaya mengurangi ketimpangan lebih mengfokuskan pada kecamatan yang masuk dalam tiap kuadran:
 - a. Kuadran I yaitu Kecamatan Palu Timur dan Mantikulore yang memilik tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan tingkat pendapatan tinggi. Berikut beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota sebagai berikut:
 - Pemerintah Kota Palu dapat fokus pada mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mendukung sektor-sektor unggulan yang telah berkontribusi pada tingkat pendapatan tinggi.

- Menciptakan iklim bisnis yang kondusif adalah kunci untuk mendorong investasi dan pertumbuhan sektor swasta.

b. Kuadran II Kecamatan Palu Utara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rendah dan tingkat pendapatan tinggi.

Berikut beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota sebagai berikut:

- Pemerintah Kota Palu perlu berfokus pada diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu yang telah mencapai tingkat pendapatan tinggi. Ini dapat dilakukan dengan mendorong perkembangan sektor-sektor baru yang memiliki potensi pertumbuhan, memberikan insentif kepada investor untuk berinvestasi di sektor-sektor tersebut, dan meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan pelatihan yang relevan.
- Infrastruktur yang baik dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam transportasi, energi, telekomunikasi, dan infrastruktur dasar lainnya dapat meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara atau

wilayah. Infrastruktur yang baik akan mempermudah aksesibilitas, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan efisiensi produksi.

c. Kuadran III Kecamatan Ulujadi, Tatanga dan Palu Selatan yang tingkat pertumbuhan ekonomi rendah dan tingkat pendapatan rendah. Pemerintah Kota Palu perlu mengimplementasikan langkah-langkah sebagai berikut :

- Program yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesempatan ekonomi bagi masyarakat di kuadran ini. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program pemberdayaan ekonomi, seperti pengembangan usaha mikro, kredit mikro, dan pelatihan kewirausahaan.
- Memberi prioritas pengembangan sektor-sektor unggulan: Identifikasi sektor-sektor potensial yang dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Fokus pada sektor-sektor ini dengan memberikan kebijakan dan insentif yang mendorong investasi, inovasi, dan pengembangan usaha dalam sektor tersebut. Dengan mengembangkan sektor-

sektor unggulan, dapat tercipta lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan perkapita.

- Pemerintah juga dapat mendorong investasi dan pengembangan infrastruktur dasar di daerah-daerah yang tertinggal.
- d. Kuadran IV Kecamatan Palu Barat dan Taweli dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan tingkat pendapatan rendah. Pemerintah Kota Palu perlu memprioritaskan upaya dalam mengatasi kesenjangan pendapatan dengan meningkatkan akses ke pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, dan kesempatan kerja. Selain itu, pemerintah juga dapat mendorong pengembangan sektor ekonomi lokal yang berpotensi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Berikut beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota sebagai berikut:
- Program pemberdayaan ekonomi bagi kelompok miskin, dan peningkatan akses ke layanan dasar dan peluang ekonomi.

- Program pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Ini akan membantu meningkatkan kualifikasi dan produktivitas tenaga kerja, serta membuka peluang untuk pekerjaan yang lebih baik dengan pendapatan yang lebih tinggi.
- Perbaiki infrastruktur dasar seperti jaringan transportasi, listrik, air bersih, dan telekomunikasi. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan konektivitas, efisiensi, dan daya saing ekonomi suatu daerah, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita.
- Dukung pengembangan kewirausahaan dan akses ke modal bagi usaha kecil dan menengah. Fasilitasi pembiayaan yang terjangkau, pelatihan kewirausahaan, dan akses ke pasar dapat membantu mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan per kapita.
- Upaya pemerintah meliputi pengembangan infrastruktur yang berkualitas, peningkatan investasi dalam riset dan

pengembangan, serta kebijakan yang mendukung inovasi dan kewirausahaan.

2. Berdasarkan analisis LQ yang memperlihatkan sektor ekonomi yang menjadi sektor basis setiap kecamatan, menjadi sektor yang potensial dikembangkan dan menjadi daya ungkit peningkatan PDRB Kota Palu, maka penguatan sektor basis pada tiap kecamatan sebagai berikut:
 - a. Palu Barat, mengoptimalkan sumber daya potensial melalui peningkatan sektor Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya. Serta mempertahankan pencapaian sektor basis pada Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda.
 - b. Tatanga, mengoptimalkan pengelolaan potensi pada sektor pertanian dan perikanan; industri pengolahan; pengadaan air, pengolahan sampah dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi motor dan mobil; informasi dan komunikasi; real estate; dan jasa perusahaan; dan industri pengolahan; serta mempertahankan potensi sektor pengadaan air, pengolahan sampah dan daur ulang.

- c. Ulujadi, mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya yang yang potensial pada sektor pertanian dan perikanan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makanan minuman; dan sektor informasi dan komunikasi. Serta mempertahankan sektor yang paling potensial yakni pada sektor pertambangan dan penggalian.
- d. Palu Selatan, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya potensial untuk dikembangkan pada sektor transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi, real estate; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta sektor jasa lainnya. Mempertahankan sektor yang paling potensial pada sektor transportasi dan pergudangan.
- e. Palu Timur, mengoptimalkan pengelolaan sumberdayapotensial pada sektor pengadaan listrik dan gas; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor; penyediaan akomodasi dan makan minum; jasa keuangan dan asuransi; serta dari sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib. Sektor basis yang penting dipertahankan pada potensi yang

paling dominan dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.

- f. Mantikulore, mempertahankan dan meningkatkan kualitas sektor yang paling potensial pada jasa pendidikan. Sektor lain yang diprioritaskan untuk dioptimalkan pengelolaan sumberdaya pada sektor Pertambangan dan Penggalian, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang; kontruksi, jasa perusahaan; dan administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Sektor basis yang penting dipertahankan pada potensi yang paling dominan dari sektor Jasa Pendidikan.
- g. Palu Utara, mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya yang potensial pada sektor pertanian dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; sektor transportasi dan pergudangan; serta mempertahankan peranan dan perolehan sumberdaya ekonomi dari sektor industri pengolahan.
- h. Tawaeli, mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya yang potensial pada sektor pertanian dan perikanan; pengadaan listrik dan gas; konstruksi; informasi dan komunikasi; real estate; jasa perusahaan; dan sektor jasa lainnya. Mempertahankan dan

meningkatkan kualitas pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.



LAMPIRAN

Perhitungan Kuadrat PDRB Perkapita Kecamatan Dikurang Rata-Rata PDRB Perkapita Seluruh Kecamatan

No	Kec	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PALU BARAT	159.58	118.54	4.67	14.14	0.22
2	TATANGA	992.07	1345.77	1047.68	1002.26	1523.51
3	ULUJADI	5.52	1.06	17.49	2.26	10.28
4	PALU SELATAN	0.44	359.14	244.81	270.89	157.96
5	PALU TIMUR	489.53	1004.29	947.70	1724.48	1981.02
6	MANTIKULORE	40.22	0.40	503.53	4.40	20.81
7	PALU UTARA	755.63	574.21	611.55	841.47	960.02
8	TAWAELI	77.69	84.75	556.81	716.64	661.68

Sumber: Diolah dari data primer (2023)

Perhitungan Jumlah Penduduk Kecamatan Dibagi Jumlah Penduduk Kota Palu (fi/N)

No	Kec	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PALU BARAT	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12
2	TATANGA	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
3	ULUJADI	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
4	PALU SELATAN	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19
5	PALU TIMUR	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11
6	MANTIKULORE	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21
7	PALU UTARA	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07
8	TAWAELI	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06

Sumber: Diolah dari data primer (2023)

Perhitungan Indeks Williamson

No	Kec	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PALU BARAT	20.764	15.038	0.581	1.745	0.028
2	TATANGA	134.177	187.383	147.600	141.608	215.870
3	ULUJADI	0.488	0.098	1.643	0.213	0.972
4	PALU SELATAN	0.084	69.334	47.266	52.215	30.396
5	PALU TIMUR	61.245	119.761	109.996	198.693	226.583
6	MANTIKULORE	8.204	0.082	103.541	0.910	4.327
7	PALU UTARA	49.026	37.334	40.077	55.162	62.952
8	TAWAELI	4.676	5.098	33.670	43.527	40.368
Total		2293.664	2449.128	2499.373	2509.074	2596.494
$\sqrt{\sum ((Y_i/Y)^2) * (f_i/n)}$		47.892	49.489	49.994	50.091	50.956
Indeks Williamson		0.262	0.290	0.341	0.312	0.316

Sumber: Diolah dari data primer (2023)

Perhitungan PDRB Kecamatan Dibagi PDRB Kota Palu (Yi/Y)

No	Kec	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PALU BARAT	0.106	0.114	0.120	0.133	0.126
2	TATANGA	0.069	0.072	0.070	0.081	0.071
3	ULUJADI	0.086	0.099	0.088	0.095	0.093
4	PALU SELATAN	0.193	0.151	0.146	0.152	0.164
5	PALU TIMUR	0.171	0.182	0.171	0.187	0.185
6	MANTIKULORE	0.228	0.218	0.276	0.218	0.225
7	PALU UTARA	0.094	0.092	0.090	0.095	0.094
8	TAWAELI	0.053	0.072	0.038	0.039	0.041

Sumber: Diolah dari data primer (2023)

Perhitungan Rata-Rata PDRB Kecamatan Dibagi PDRB Kota Palu (Yij/Y)

No	Kec	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PALU BARAT	1.181	1.096	1.042	0.937	0.992
2	TATANGA	1.803	1.730	1.782	1.551	1.768
3	ULUJADI	1.446	1.261	1.426	1.320	1.349
4	PALU SELATAN	0.648	0.830	0.856	0.822	0.761
5	PALU TIMUR	0.731	0.687	0.731	0.668	0.675
6	MANTIKULORE	0.549	0.573	0.452	0.572	0.555
7	PALU UTARA	1.326	1.361	1.382	1.320	1.325
8	TAWAELI	2.375	1.739	3.263	3.212	3.024

Sumber: Diolah dari data primer (2023)

Perhitungan Ln Rata-Rata PDRB Perkapita Kecamatan Dibagi PDRB Perkapita Kota Palu [Ln (Yij/Yi)]

No	Kec	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PALU BARAT	0.207	0.106	0.036	-0.077	-0.029
2	TATANGA	0.668	0.656	0.697	0.562	0.695
3	ULUJADI	0.023	-0.072	0.069	-0.005	0.021
4	PALU SELATAN	-0.004	0.248	0.279	0.237	0.158
5	PALU TIMUR	-0.313	-0.423	-0.388	-0.485	-0.482
6	MANTIKULORE	-0.110	-0.066	-0.296	-0.055	-0.081
7	PALU UTARA	-0.374	-0.345	-0.322	-0.368	-0.363
8	TAWAELI	0.134	-0.178	0.457	0.445	0.389

Sumber: Diolah dari data primer (2023)

Hasil Perhitungan Theil Within

No	Kec	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PALU BARAT	0.0258	0.0133	0.0045	-0.0097	-0.0036
2	TATANGA	0.0835	0.0820	0.0872	0.0702	0.0869
3	ULUJADI	0.0029	-0.0090	0.0086	-0.0006	0.0026
4	PALU SELATAN	-0.0005	0.0310	0.0349	0.0296	0.0197
5	PALU TIMUR	-0.0391	-0.0529	-0.0484	-0.0607	-0.0603
6	MANTIKULORE	-0.0137	-0.0083	-0.0370	-0.0069	-0.0101
7	PALU UTARA	-0.0467	-0.0432	-0.0402	-0.0459	-0.0454
8	TAWAELI	0.0168	-0.0223	0.0571	0.0557	0.0486
	Theil Within	0.0290	-0.0093	0.0666	0.0317	0.0384

Sumber: Diolah dari data primer (2023)

Hasil Perhitungan Theil Between

No	Kec	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PALU BARAT	-0.0219	-0.0121	-0.0043	0.0103	0.0036
2	TATANGA	-0.0463	-0.0474	-0.0489	-0.0453	-0.0491
3	ULUJADI	-0.0020	0.0071	-0.0061	0.0004	-0.0019
4	PALU SELATAN	0.0008	-0.0374	-0.0408	-0.0360	-0.0259
5	PALU TIMUR	0.0535	0.0770	0.0663	0.0908	0.0893
6	MANTIKULORE	0.0249	0.0145	0.0818	0.0120	0.0182
7	PALU UTARA	0.0352	0.0317	0.0291	0.0348	0.0343
8	TAWAELI	-0.0071	0.0128	-0.0175	-0.0173	-0.0161
	Theil Between	0.0373	0.0462	0.0596	0.0498	0.0523

Sumber: Diolah dari data primer (2023)

Nilai Rij, Rin, dan Rn pada perhitungan Shifshare Kecamatan Palu Barat dan Kecamatan Tatanga (Tahun 2018 ke 2022)

Kategori	Palu Barat			Tatanga		
	Rij	Rin	Rn	Rij	Rin	Rn
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	0.4899	0.1431	0.2516	0.1645	0.1431	0.2516
B	-0.0893	0.2476	0.2516	-0.0893	0.2476	0.2516
C	-0.0951	0.1499	0.2516	0.2919	0.1499	0.2516
D	-0.9563	0.2360	0.2516	0.2360	0.2360	0.2516
E	-0.3300	0.1995	0.2516	0.1386	0.1995	0.2516
F	0.7816	0.3881	0.2516	0.0318	0.3881	0.2516
G	1.0934	0.3953	0.2516	0.6775	0.3953	0.2516
H	0.7919	0.0001	0.2516	0.0892	0.0001	0.2516
I	-0.0077	0.1162	0.2516	3.1228	0.1162	0.2516
J	0.0433	0.3681	0.2516	0.3218	0.3681	0.2516
K	0.4657	0.2572	0.2516	0.3290	0.2572	0.2516
L	0.1176	0.1991	0.2516	0.3063	0.1991	0.2516
M,N	0.1233	0.1957	0.2516	-0.6004	0.1957	0.2516
O	0.0503	0.2387	0.2516	1.3506	0.2387	0.2516
P	0.1367	0.1219	0.2516	0.2662	0.1219	0.2516
Q	1.1230	0.4390	0.2516	0.4248	0.4390	0.2516
R,S,T,U	0.1447	0.1971	0.2516	0.2470	0.1971	0.2516

Sumber: Diolah dari data primer (2023)

**Nilai Rij, Rin, dan Rn pada perhitungan Shifshare Kecamatan
Ulujadi dan Kecamatan Palu Selatan (Tahun 2018 ke 2022)**

Kategori	Ulujadi			Palu Selatan		
	Rij	Rin	Rn	Rij	Rin	Rn
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	0.3742	0.1431	0.2516	2.0295	0.1431	0.2516
B	0.2889	0.2476	0.2516	-0.1220	0.2476	0.2516
C	0.0924	0.1499	0.2516	-0.2124	0.1499	0.2516
D	0.8891	0.2360	0.2516	0.2360	0.2360	0.2516
E	0.0631	0.1995	0.2516	0.3300	0.1995	0.2516
F	1.7937	0.3881	0.2516	-0.0598	0.3881	0.2516
G	0.4049	0.3953	0.2516	-0.2408	0.3953	0.2516
H	0.0772	0.0001	0.2516	-0.0167	0.0001	0.2516
I	-0.9825	0.1162	0.2516	0.3327	0.1162	0.2516
J	0.3227	0.3681	0.2516	0.3478	0.3681	0.2516
K	-0.0033	0.2572	0.2516	0.4292	0.2572	0.2516
L	0.2408	0.1991	0.2516	0.1753	0.1991	0.2516
M,N	0.5021	0.1957	0.2516	0.0457	0.1957	0.2516
O	0.9975	0.2387	0.2516	0.0050	0.2387	0.2516
P	0.2038	0.1219	0.2516	0.2327	0.1219	0.2516
Q	-0.0715	0.4390	0.2516	0.4634	0.4390	0.2516
R,S,T,U	0.2709	0.1971	0.2516	0.2039	0.1971	0.2516

Sumber: Diolah dari data primer (2023)

Nilai Rij, Rin, dan Rn pada perhitungan Shifshare Kecamatan Palu Timur dan Kecamatan Palu Utara (Tahun 2018 ke 2022)

Kategori	Palu Timur			Mantikulore		
	Rij	Rin	Rn	Rij	Rin	Rn
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	1.8194	0.1431	0.2516	0.3640	0.1431	0.2516
B	#DIV/0!	0.2476	0.2516	0.4104	0.2476	0.2516
C	-0.5776	0.1499	0.2516	-0.0880	0.1499	0.2516
D	0.2093	0.2360	0.2516	0.2360	0.2360	0.2516
E	-0.1119	0.1995	0.2516	0.3198	0.1995	0.2516
F	3.0294	0.3881	0.2516	0.0816	0.3881	0.2516
G	0.1868	0.3953	0.2516	0.3259	0.3953	0.2516
H	-0.0201	0.0001	0.2516	0.0548	0.0001	0.2516
I	0.6870	0.1162	0.2516	-0.8671	0.1162	0.2516
J	1.2974	0.3681	0.2516	0.4451	0.3681	0.2516
K	0.0702	0.2572	0.2516	0.0195	0.2572	0.2516
L	0.0843	0.1991	0.2516	0.2396	0.1991	0.2516
M,N	-0.0324	0.1957	0.2516	0.5068	0.1957	0.2516
O	0.1376	0.2387	0.2516	0.5484	0.2387	0.2516
P	0.1190	0.1219	0.2516	0.1019	0.1219	0.2516
Q	0.3549	0.4390	0.2516	0.4083	0.4390	0.2516
R,S,T,U	0.1106	0.1971	0.2516	0.2068	0.1971	0.2516

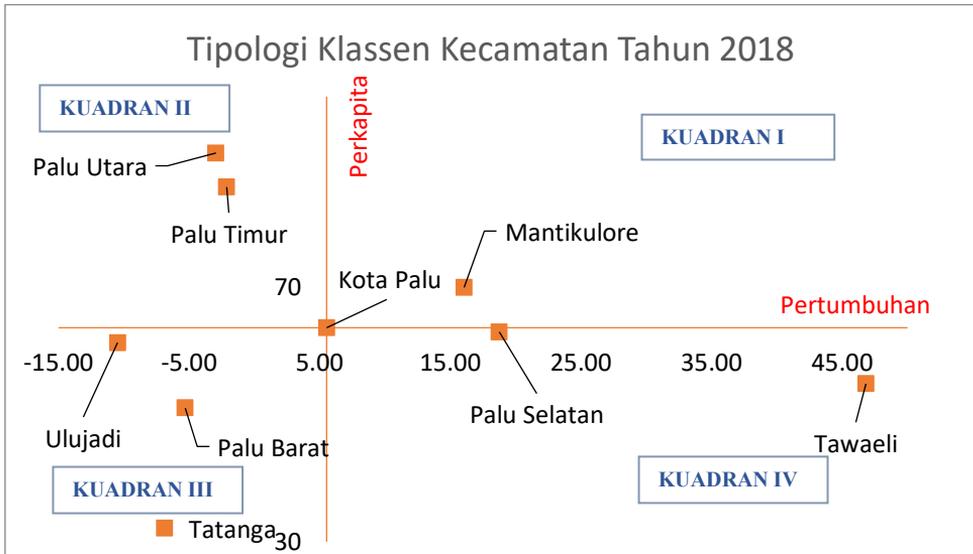
Sumber: Diolah dari data primer (2023)

Nilai Rij, Rin, dan Rn pada perhitungan Shifshare Kecamatan Tawaeli dan Kecamatan Mantikulore (Tahun 2018 ke 2022)

Kategori	Palu Utara			Tawaeli		
	Rij	Rin	Rn	Rij	Rin	Rn
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	-0.1269	0.1431	0.2516	-0.4162	0.1431	0.2516
B	-0.0769	0.2476	0.2516	1.8762	0.2476	0.2516
C	0.4205	0.1499	0.2516	0.2214	0.1499	0.2516
D	0.2360	0.2360	0.2516	-0.5899	0.2360	0.2516
E	0.4083	0.1995	0.2516	0.4103	0.1995	0.2516
F	1.3660	0.3881	0.2516	0.0818	0.3881	0.2516
G	0.1900	0.3953	0.2516	0.4024	0.3953	0.2516
H	-0.0402	0.0001	0.2516	-0.6254	0.0001	0.2516
I	-0.0559	0.1162	0.2516	-0.2529	0.1162	0.2516
J	0.0905	0.3681	0.2516	0.3293	0.3681	0.2516
K	-0.0033	0.2572	0.2516	-0.0033	0.2572	0.2516
L	0.1805	0.1991	0.2516	0.1741	0.1991	0.2516
M,N	0.1638	0.1957	0.2516	6.4367	0.1957	0.2516
O	0.6763	0.2387	0.2516	-0.1939	0.2387	0.2516
P	0.3324	0.1219	0.2516	0.2924	0.1219	0.2516
Q	0.5923	0.4390	0.2516	0.7390	0.4390	0.2516
R,S,T,U	0.2092	0.1971	0.2516	0.2027	0.1971	0.2516

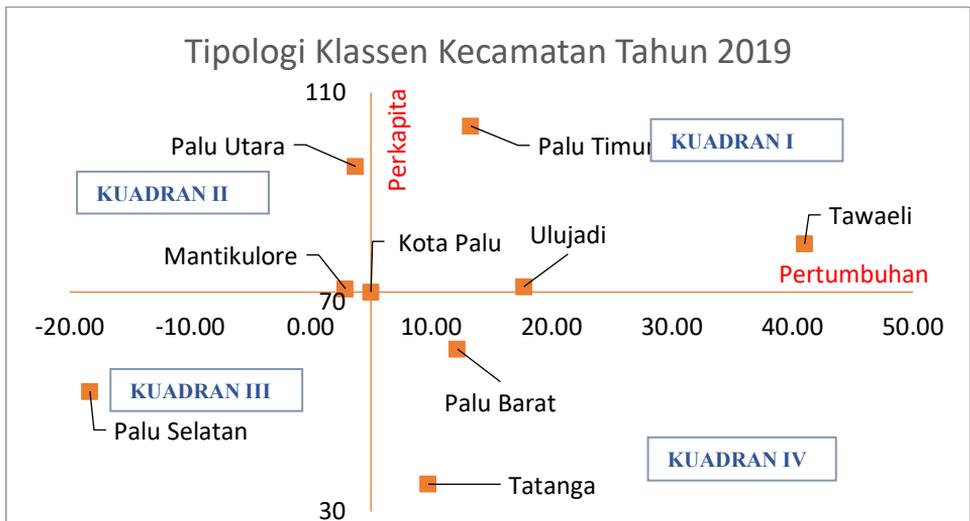
Sumber: Diolah dari data primer (2023)

Kriteria Kecamatan dari Laju pertumbuhan dan PDRB perkapita Tahun 2018



Sumber: Diolah dari data primer (2023)

Kriteria Kecamatan dari Laju pertumbuhan dan PDRB perkapita Tahun 2019



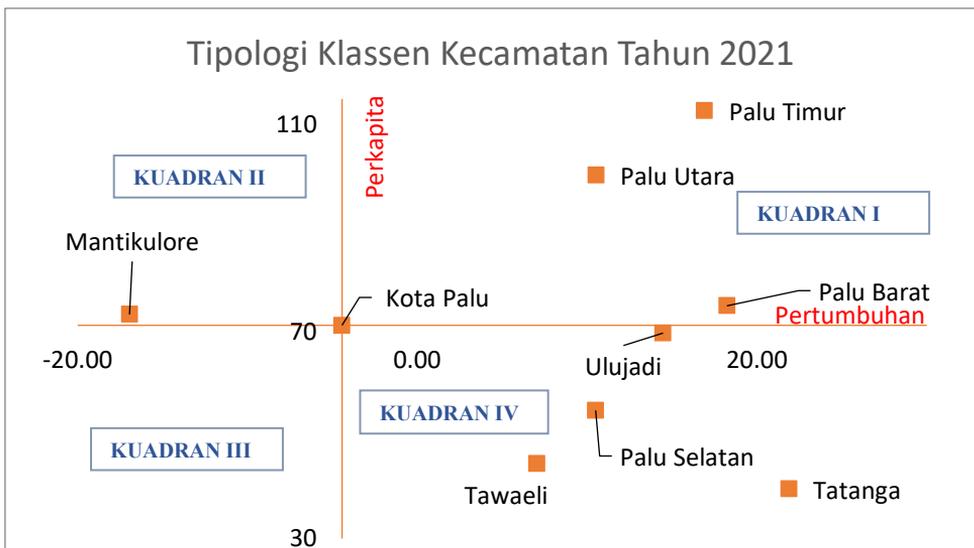
Sumber: Diolah dari data primer (2023)

Kriteria Kecamatan dari Laju pertumbuhan dan PDRB perkapita Tahun 2020



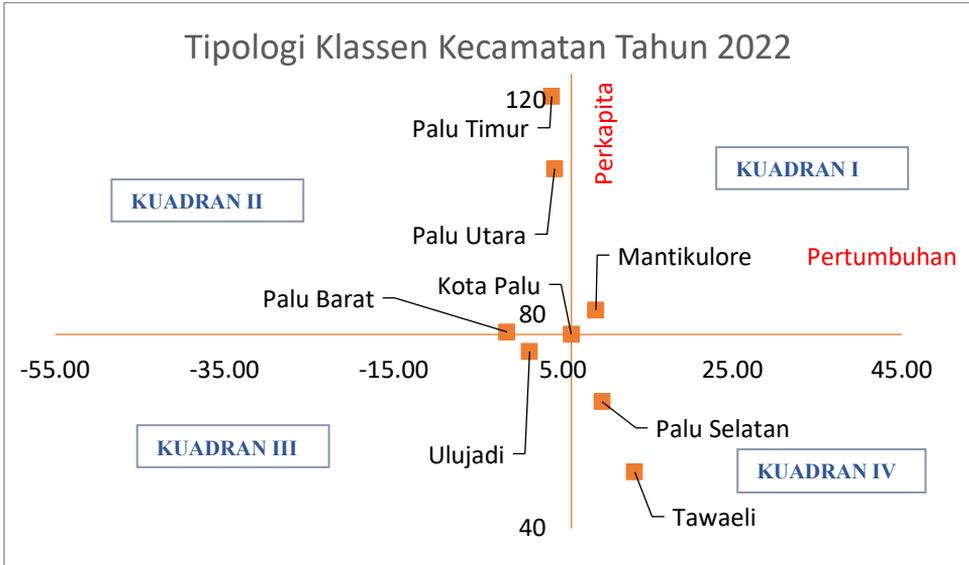
Sumber: Diolah dari data primer (2023)

Kriteria Kecamatan dari Laju pertumbuhan dan PDRB perkapita Tahun 2021



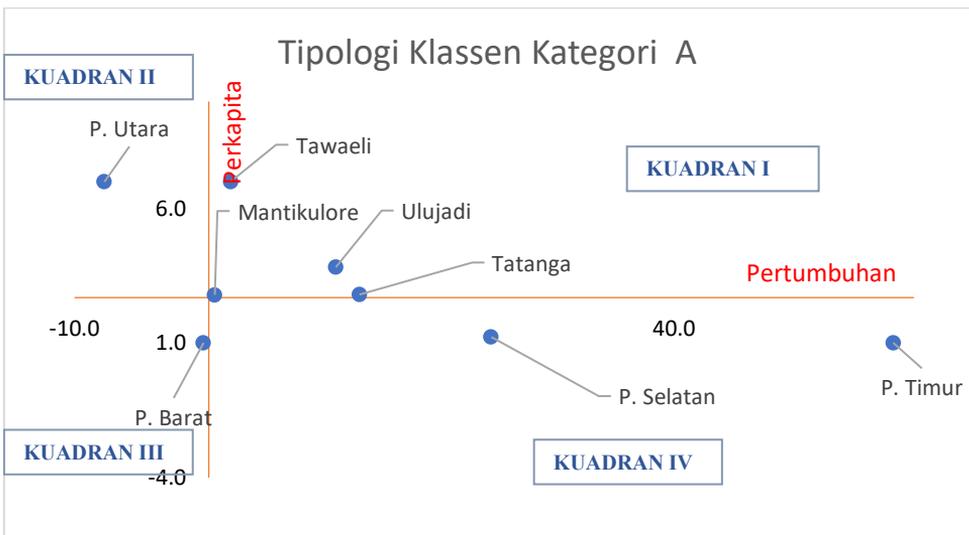
Sumber: Diolah dari data primer (2023)

Kriteria Kecamatan dari Laju pertumbuhan dan PDRB perkapita Tahun 2022



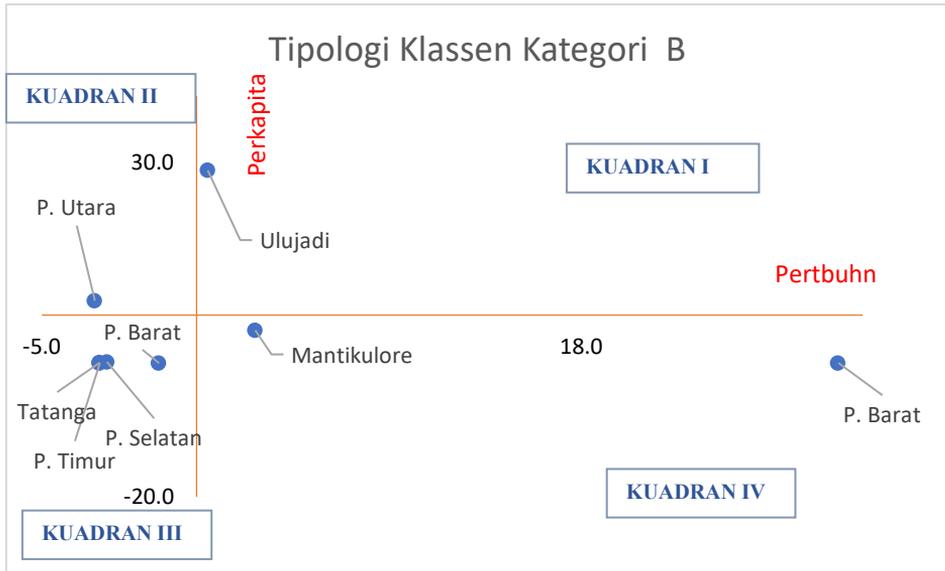
Sumber: Diolah dari data primer (2023)

Kriteria Kecamatan dari Rata-rata Laju pertumbuhan dan rata-rata PDRB perkapita Kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) Tahun 2018-2022



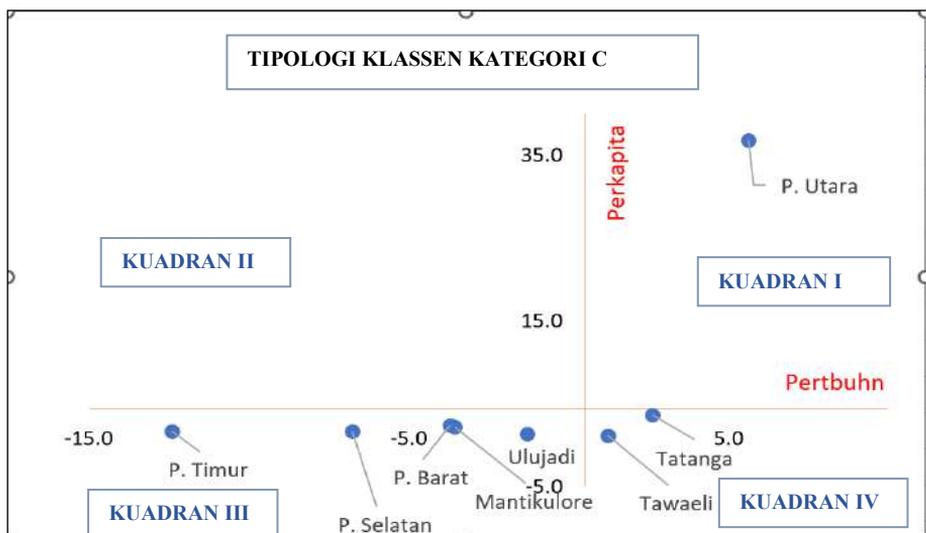
Sumber: Diolah dari data primer (2023)

Kriteria Kecamatan dari Rata-rata Laju pertumbuhan dan rata-rata PDRB perkapita Kategori B (Pertambangan dan Penggalian) Tahun 2018-2022



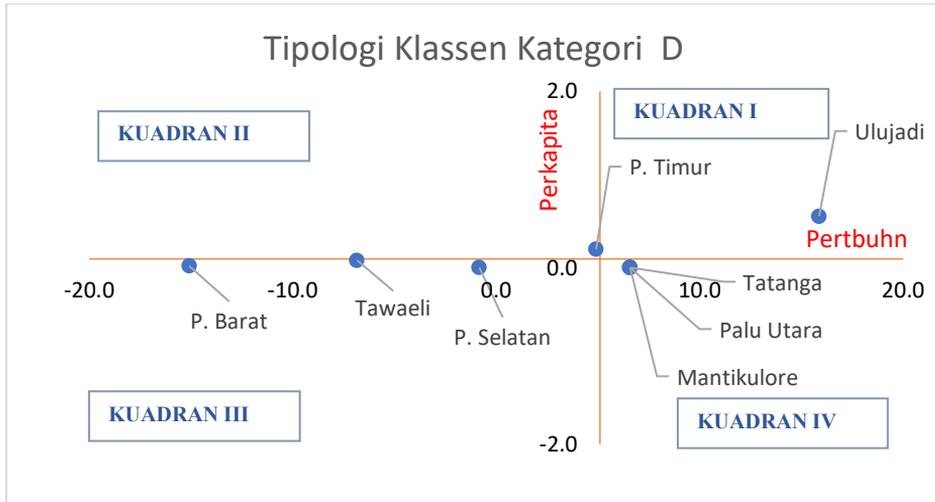
Sumber: Diolah dari data primer (2023)

Kriteria Kecamatan dari Rata-rata Laju pertumbuhan dan rata-rata PDRB perkapita Kategori C (Industri Pengolahan) Tahun 2018-2022



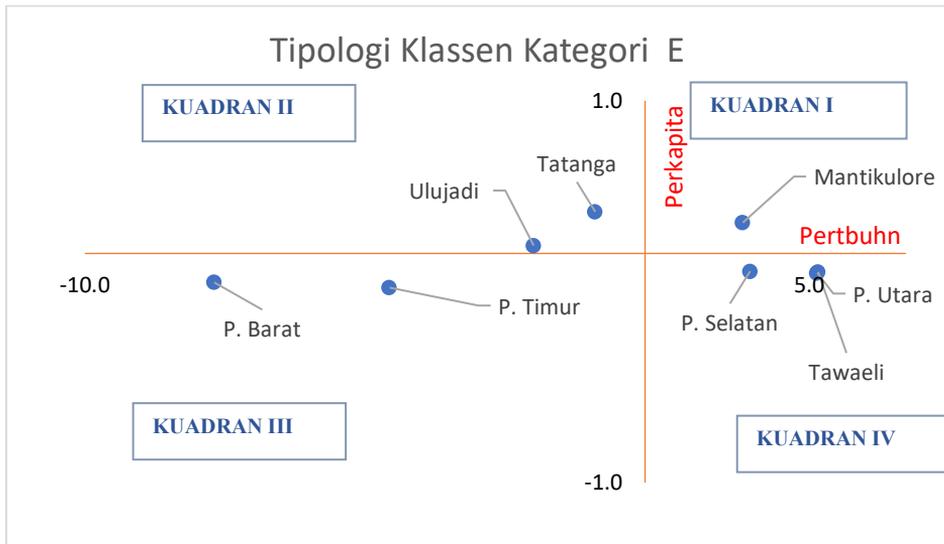
Sumber: Diolah dari data primer (2023)

Kriteria Kecamatan dari Rata-rata Laju pertumbuhan dan rata-rata PDRB perkapita Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas) Tahun 2018-2022



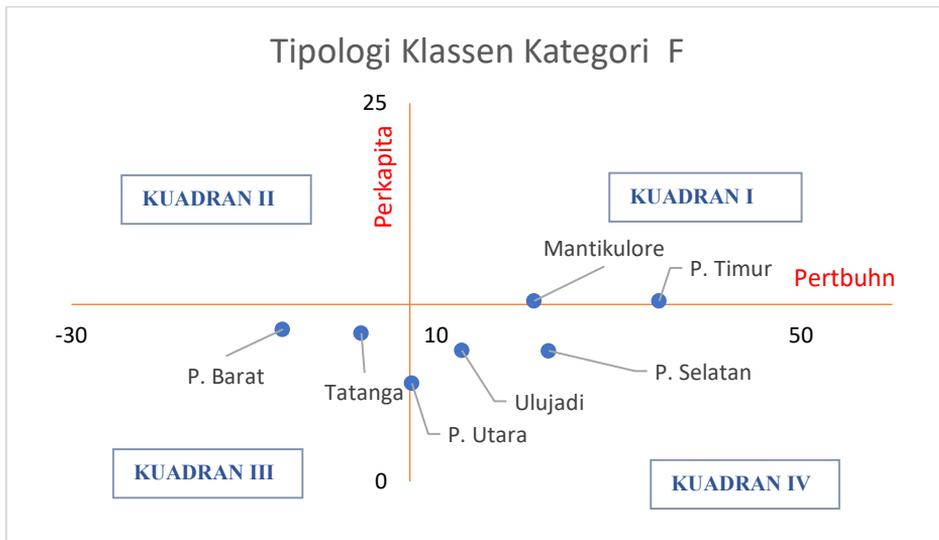
Sumber: Diolah dari data primer (2023)

Kriteria Kecamatan dari Rata-rata Laju pertumbuhan dan rata-rata PDRB perkapita Kategori E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang) Tahun 2018-2022



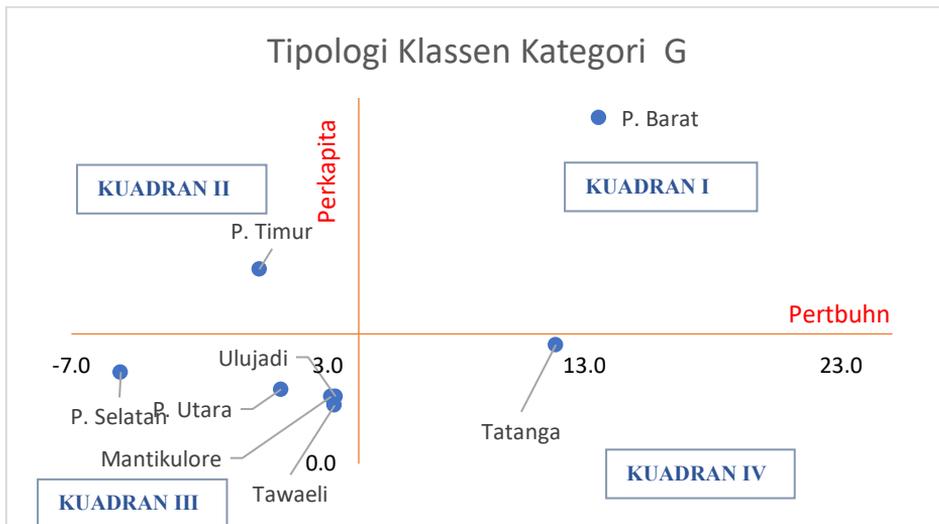
Sumber: Diolah dari data primer (2023)

Kriteria Kecamatan dari Rata-rata Laju pertumbuhan dan rata-rata PDRB perkapita Kategori F (Konstruksi) Tahun 2018-2022



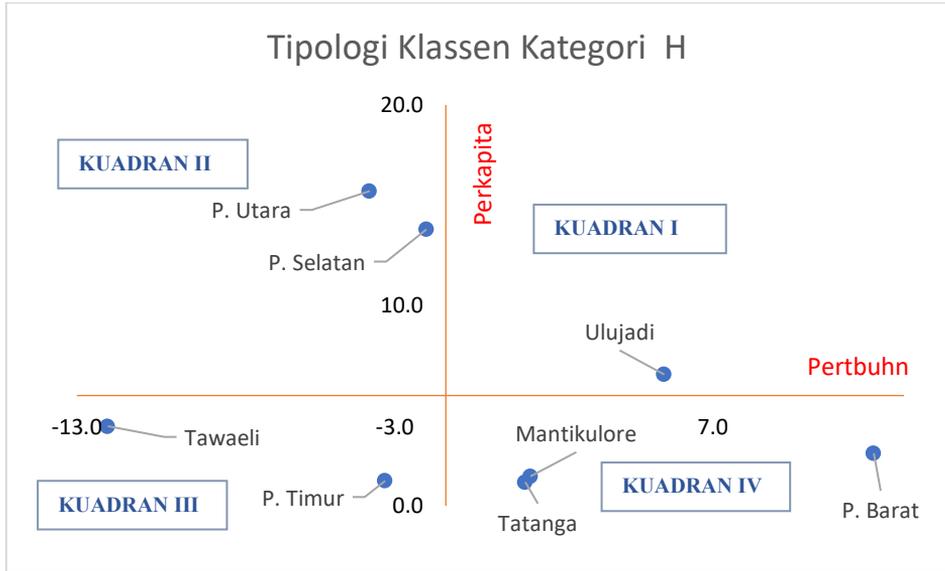
Sumber: Diolah dari data primer (2023)

Kriteria Kecamatan dari Rata-rata Laju pertumbuhan dan rata-rata PDRB perkapita Kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) Tahun 2018-2022



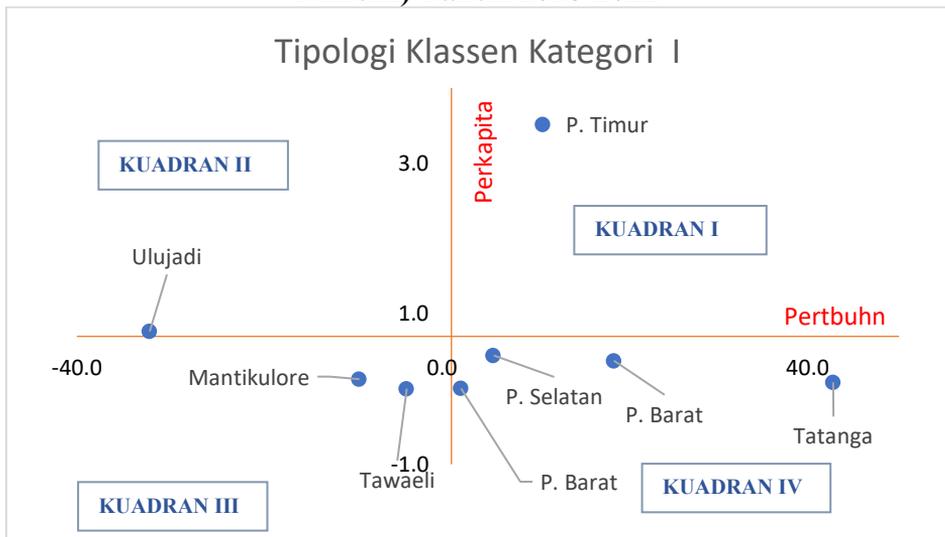
Sumber: Diolah dari data primer (2023)

Kriteria Kecamatan dari Rata-rata Laju pertumbuhan dan rata-rata PDRB perkapita Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) Tahun 2018-2022



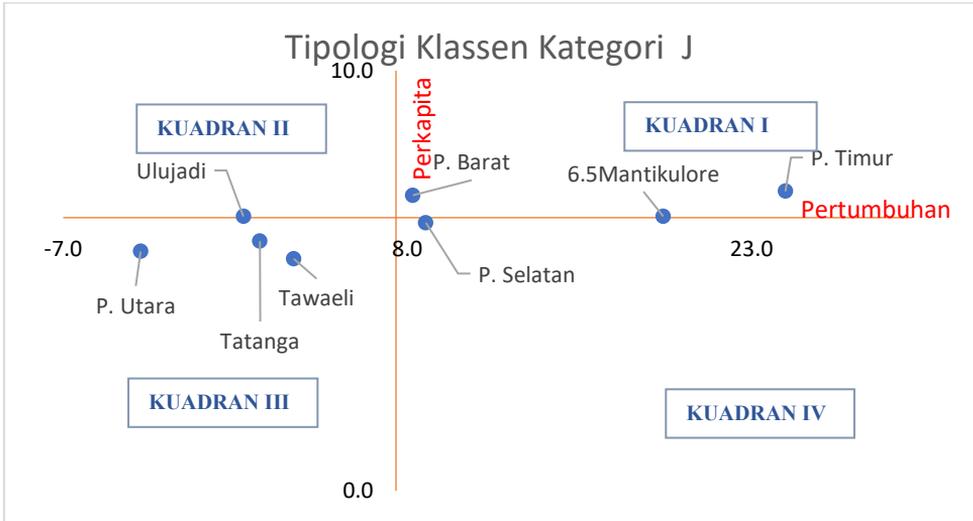
Sumber: Diolah dari data primer (2023)

Kriteria Kecamatan dari Rata-rata Laju pertumbuhan dan rata-rata PDRB perkapita Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) Tahun 2018-2022



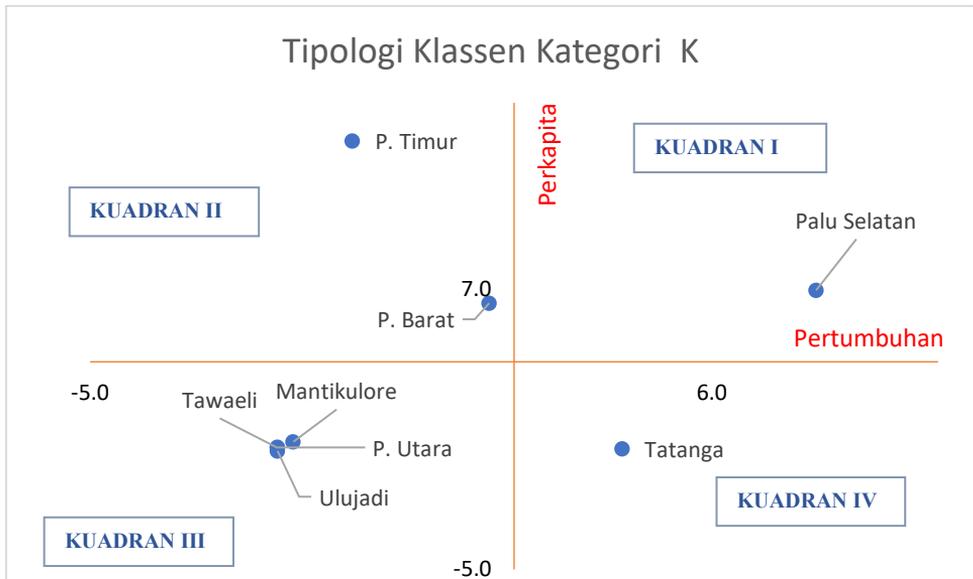
Sumber: Diolah dari data primer (2023)

Kriteria Kecamatan dari Rata-rata Laju pertumbuhan dan rata-rata PDRB perkapita Kategori J (Informasi dan Komunikasi) Tahun 2018-2022



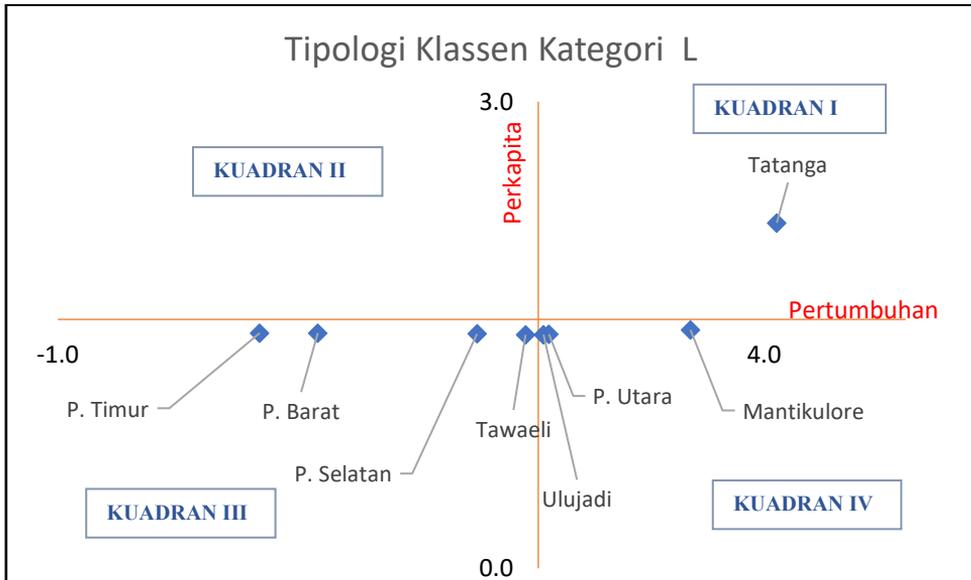
Sumber: Diolah dari data primer (2023)

Kriteria Kecamatan dari Rata-rata Laju pertumbuhan dan rata-rata PDRB perkapita Kategori K (Jasa Keuangan dan Asuransi) Tahun 2018-2022



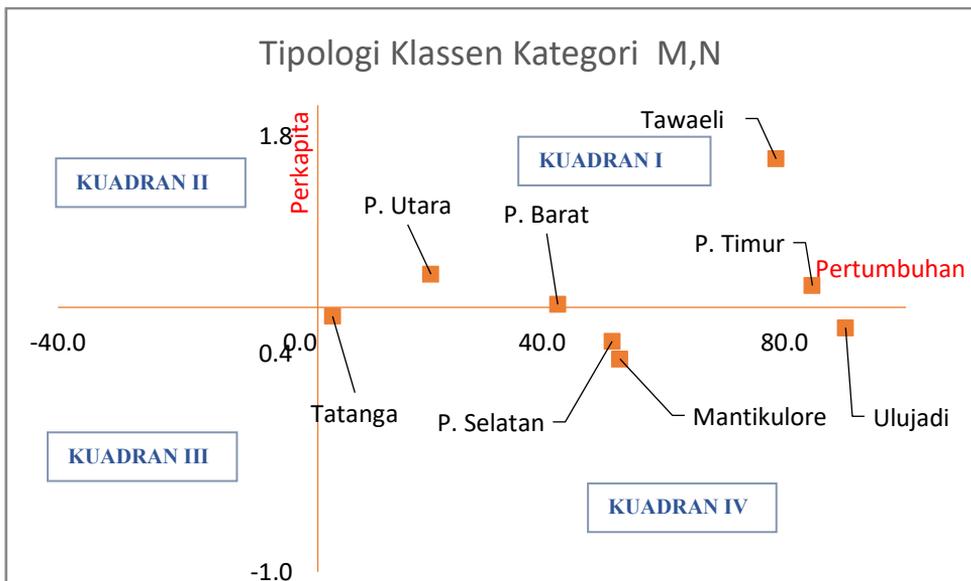
Sumber: Diolah dari data primer (2023)

Kriteria Kecamatan dari Rata-rata Laju pertumbuhan dan rata-rata PDRB perkapita Kategori L (Real Estate) Tahun 2018-2022



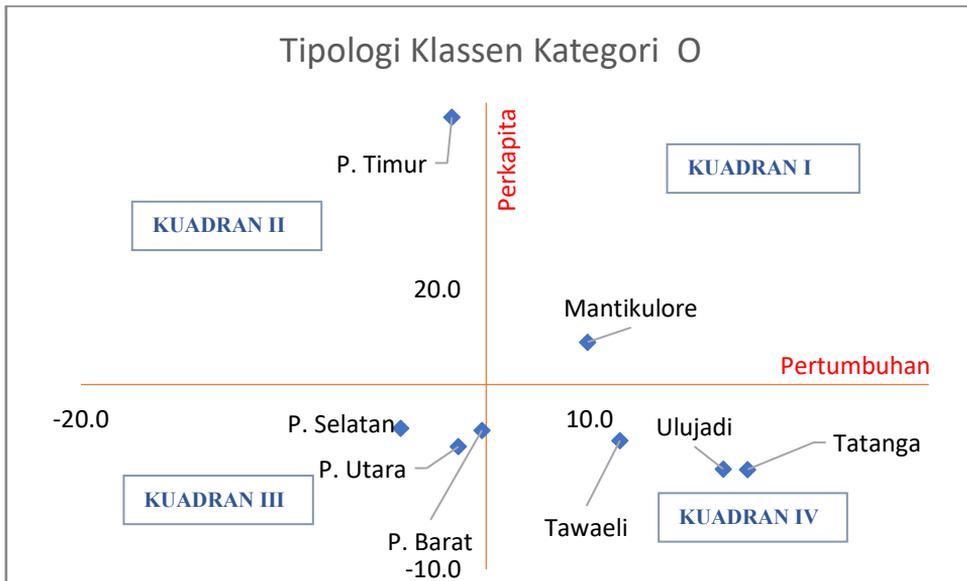
Sumber: Diolah dari data primer (2023)

Kriteria Kecamatan dari Rata-rata Laju pertumbuhan dan rata-rata PDRB perkapita Kategori M,N (Jasa Perusahaan) Tahun 2018-2022



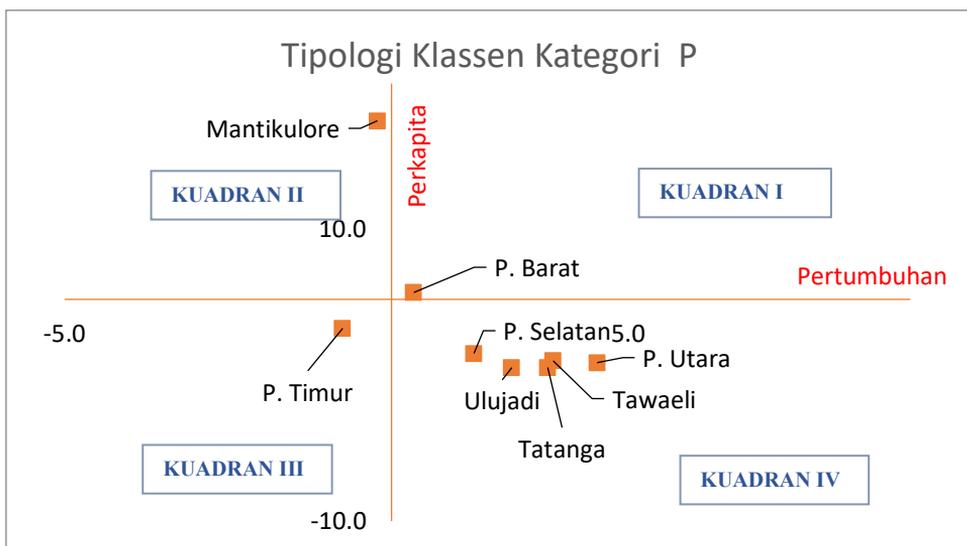
Sumber: Diolah dari data primer (2023)

Kriteria Kecamatan dari Rata-rata Laju pertumbuhan dan rata-rata PDRB perkapita Kategori O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib) Tahun 2018-2022



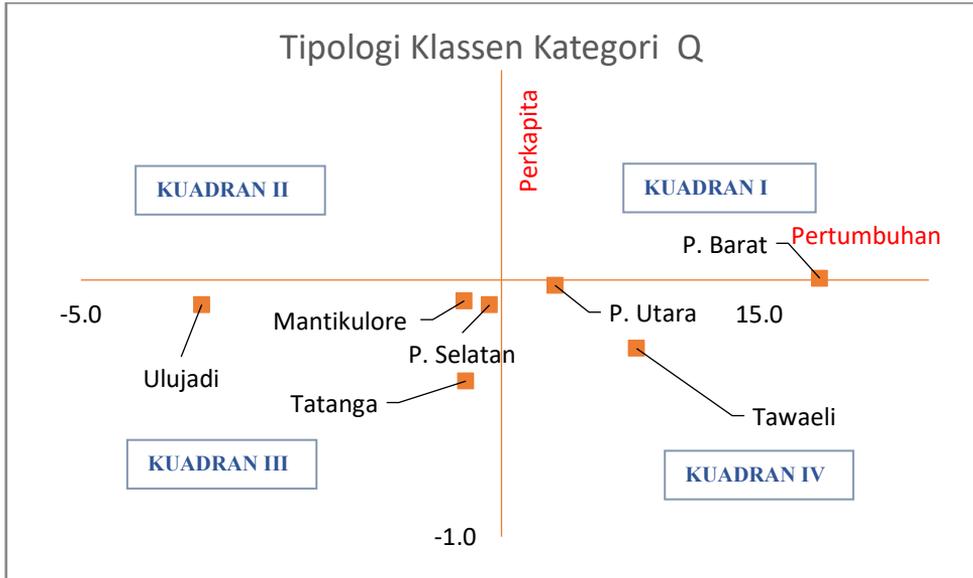
Sumber: Diolah dari data primer (2023)

Kriteria Kecamatan dari Rata-rata Laju pertumbuhan dan rata-rata PDRB perkapita Kategori P (Jasa Pendidikan) Tahun 2018-2022



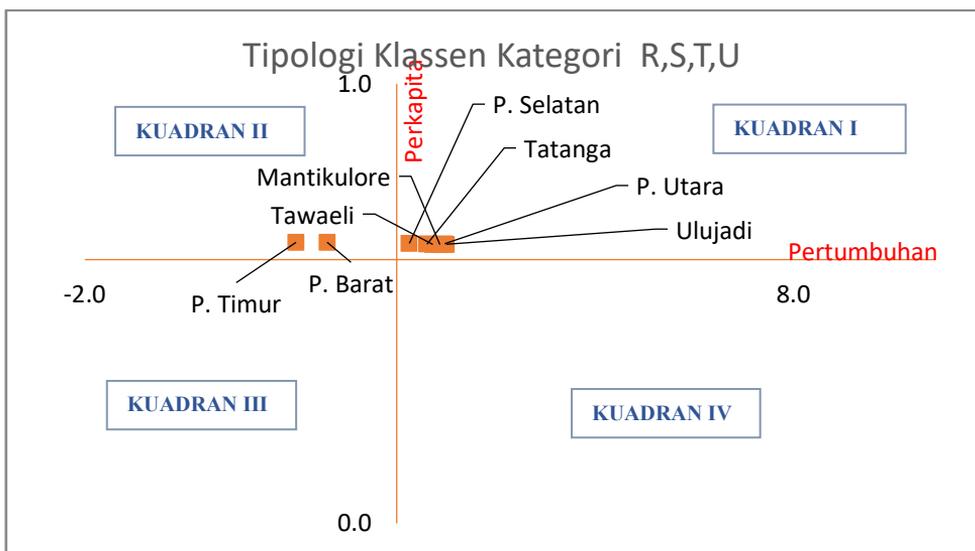
Sumber: Diolah dari data primer (2023)

Kriteria Kecamatan dari Rata-rata Laju pertumbuhan dan rata-rata PDRB perkapita Kategori Q (Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial) Tahun 2018-2022



Sumber: Diolah dari data primer (2023)

Kriteria Kecamatan dari Rata-rata Laju pertumbuhan dan rata-rata PDRB perkapita Kategori R,S,T,U (Jasa lainnya) Tahun 2018-2022



Sumber: Diolah dari data primer (2023)

PDRB Perkapita Palu Barat ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Dalam Juta Rupiah)

Kode	Kategori	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian	0.85	0.75	1.02	1.18	1.28
B	Pertambangan	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
C	Industri Pengolahan	2.87	2.09	2.33	2.48	2.62
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
E	Pengadaan Air	0.07	0.04	0.04	0.04	0.05
F	Konstruksi	6.67	8.28	9.35	16.86	11.99
G	Perdagangan	11.52	19.05	18.63	21.06	24.33
H	Transportasi dan Pergudangan	2.08	2.74	2.19	2.33	3.76
I	Akomodasi dan MaMin	0.57	0.15	0.27	0.33	0.57
J	Infokom	7.14	6.64	6.72	7.15	7.51
K	Jasa Keuangan	5.18	5.60	6.44	7.18	7.66
L	Real Estate	1.48	1.45	1.44	1.52	1.67
M,N	Jasa Perusahaan	0.60	1.08	0.36	0.38	0.68
O	Administrasi Pemerintahan	4.66	4.73	4.96	5.27	4.94
P	Jasa Pendidikan	5.25	5.61	5.64	5.83	6.02
Q	Jasa Kesehatan	1.37	2.17	2.43	2.73	2.93
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.60	0.63	0.62	0.65	0.70
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	51.02	61.02	62.45	75.00	76.71

Sumber: Diolah dari data primer

PDRB Perkapita Tatanga ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Dalam Juta Rupiah)

Kode	Kategori	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian	2.95	2.78	2.37	2.85	3.12
B	Pertambangan	0.12	0.11	0.08	0.09	0.10
C	Industri Pengolahan	3.39	3.36	3.61	3.81	3.97
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	Pengadaan Air	0.43	0.39	0.40	0.43	0.45
F	Konstruksi	7.83	9.33	7.13	12.10	7.33
G	Perdagangan	5.21	6.27	6.16	6.96	7.92
H	Transportasi dan Pergudangan	1.25	1.38	1.00	1.06	1.23
I	Akomodasi dan MaMin	0.03	0.06	0.12	0.14	0.10
J	Infokom	5.46	5.62	5.80	6.29	6.54
K	Jasa Keuangan	0.17	0.15	0.17	0.19	0.20
L	Real Estate	2.08	2.12	2.17	2.27	2.46
M,N	Jasa Perusahaan	0.72	1.03	0.46	0.46	0.26
O	Administrasi Pemerintahan	0.54	0.54	0.65	0.68	1.15
P	Jasa Pendidikan	0.49	0.52	0.54	0.55	0.56
Q	Jasa Kesehatan	0.89	0.92	0.97	1.08	1.15
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.60	0.63	0.62	0.64	0.68
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		32.16	35.23	32.24	39.58	37.21

Sumber: Diolah dari data primer

PDRB Perkapita Ulujadi ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Dalam Juta Rupiah)

Kode	Kategori	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian	3.51	3.49	3.93	3.95	4.28
B	Pertambangan	26.63	33.77	26.29	27.24	30.48
C	Industri Pengolahan	1.54	1.26	1.36	1.44	1.50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.41	0.60	0.60	0.63	0.69
E	Pengadaan Air	0.27	0.22	0.22	0.24	0.25
F	Konstruksi	4.32	7.60	7.95	14.51	10.72
G	Perdagangan	3.44	3.55	3.36	3.77	4.30
H	Transportasi dan Pergudangan	7.35	8.71	4.69	4.96	7.03
I	Akomodasi dan MaMin	1.66	0.90	0.59	0.66	0.03
J	Infokom	6.06	6.15	6.47	6.85	7.12
K	Jasa Keuangan	0.09	0.07	0.07	0.07	0.08
L	Real Estate	1.48	1.45	1.44	1.51	1.63
M,N	Jasa Perusahaan	0.43	1.15	0.10	0.31	0.57
O	Administrasi Pemerintahan	0.68	0.61	0.61	0.64	1.21
P	Jasa Pendidikan	0.51	0.51	0.52	0.53	0.54
Q	Jasa Kesehatan	2.32	2.25	1.62	1.80	1.91
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.60	0.63	0.62	0.64	0.68
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		61.30	72.94	60.43	69.74	73.03

Sumber: Diolah dari data primer

PDRB Perkapita Palu Selatan ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Dalam Juta Rupiah)

Kode	Kategori	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian	0.60	0.73	1.56	1.56	1.72
B	Pertambangan					
C	Industri Pengolahan	2.16	1.52	1.45	1.54	1.61
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	Pengadaan Air	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12
F	Konstruksi	12.72	7.22	7.10	9.74	11.33
G	Perdagangan	7.19	4.18	3.97	4.55	5.17
H	Transportasi dan Pergudangan	16.81	16.41	9.39	10.70	15.66
I	Akomodasi dan MaMin	0.47	0.35	0.37	0.45	0.59
J	Infokom	5.57	6.01	6.38	6.81	7.12
K	Jasa Keuangan	6.07	5.78	7.00	7.75	8.23
L	Real Estate	1.48	1.45	1.44	1.51	1.65
M,N	Jasa Perusahaan	0.63	0.24	1.00	0.28	0.62
O	Administrasi Pemerintahan	5.32	4.92	4.96	5.24	5.06
P	Jasa Pendidikan	1.37	1.42	1.52	1.56	1.60
Q	Jasa Kesehatan	1.67	1.78	1.95	2.17	2.32
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.60	0.63	0.62	0.64	0.69
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		62.99	52.96	48.97	54.78	63.67

Sumber: Diolah dari data primer

PDRB Perkapita Palu Timur ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Dalam Juta Rupiah)

Kode	Kategori	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian	0.36	1.84	0.91	0.94	1.04
B	Pertambangan	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	2.50	2.67	0.98	1.04	1.10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.19	0.20	0.20	0.21	0.24
E	Pengadaan Air	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
F	Konstruksi	4.94	16.37	11.00	20.25	20.68
G	Perdagangan	10.22	9.77	9.49	11.08	12.60
H	Transportasi dan Pergudangan	1.27	1.50	1.05	1.09	1.29
I	Akomodasi dan MaMin	2.60	3.77	3.06	3.59	4.55
J	Infokom	3.57	7.58	7.85	8.11	8.52
K	Jasa Keuangan	13.17	12.96	12.32	13.72	14.63
L	Real Estate	1.48	1.45	1.44	1.52	1.67
M,N	Jasa Perusahaan	1.47	0.91	0.17	1.15	1.47
O	Administrasi Pemerintahan	35.87	36.11	37.73	40.08	42.38
P	Jasa Pendidikan	2.95	3.14	3.22	3.32	3.43
Q	Jasa Kesehatan	4.57	4.67	5.34	5.99	6.43
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.60	0.63	0.62	0.65	0.70
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		85.78	103.60	95.40	112.77	120.75

Sumber: Diolah dari data primer

**Perkapita Mantikulore ADHB Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2018-2022 (Dalam Juta Rupiah)**

Kode	Kategori	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian	2.32	2.91	3.14	2.73	2.94
B	Pertambangan	4.42	5.15	4.19	5.10	5.81
C	Industri Pengolahan	2.72	1.95	2.12	2.22	2.31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	Pengadaan Air	0.32	0.35	0.35	0.38	0.40
F	Konstruksi	16.02	13.10	28.29	12.14	16.15
G	Perdagangan	3.45	3.51	3.33	3.77	4.27
H	Transportasi dan Pergudangan	1.55	1.73	1.23	1.32	1.52
I	Akomodasi dan MaMin	0.23	0.08	0.15	0.17	0.03
J	Infokom	5.41	6.27	6.68	7.02	7.28
K	Jasa Keuangan	0.52	0.47	0.42	0.47	0.49
L	Real Estate	1.48	1.45	1.44	1.58	1.71
M,N	Jasa Perusahaan	0.76	0.80	1.35	0.80	1.07
O	Administrasi Pemerintahan	11.14	14.48	14.69	15.41	16.07
P	Jasa Pendidikan	17.25	17.85	17.04	17.38	17.71
Q	Jasa Kesehatan	1.79	1.81	2.00	2.22	2.35
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.60	0.63	0.62	0.64	0.68
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		69.99	72.54	87.05	73.34	80.80

Sumber: Diolah dari data primer

PDRB Perkapita Palu Utara ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Dalam Juta Rupiah)

Kode	Kategori	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian	8.70	7.32	5.37	6.53	7.14
B	Pertambangan	10.69	10.48	7.95	8.26	9.27
C	Industri Pengolahan	30.71	35.96	37.10	39.19	40.99
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	Pengadaan Air	0.08	0.09	0.10	0.10	0.11
F	Konstruksi	5.57	6.98	7.57	12.88	12.37
G	Perdagangan	4.17	3.79	3.63	4.07	4.66
H	Transportasi dan Pergudangan	16.95	17.88	13.98	14.42	15.28
I	Akomodasi dan MaMin	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
J	Infokom	5.91	5.48	5.22	5.81	6.06
K	Jasa Keuangan	0.23	0.21	0.19	0.21	0.22
L	Real Estate	1.48	1.45	1.44	1.51	1.64
M,N	Jasa Perusahaan	0.66	0.13	0.23	0.25	0.72
O	Administrasi Pemerintahan	2.83	2.70	2.80	2.95	4.46
P	Jasa Pendidikan	0.76	0.76	0.90	0.92	0.95
Q	Jasa Kesehatan	1.78	1.99	2.24	2.50	2.66
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.60	0.63	0.62	0.64	0.69
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		91.14	95.87	89.34	100.25	107.22

Sumber: Diolah dari data primer

PDRB Perkapita Tawaeli ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Dalam Juta Rupiah)

Kode	Kategori	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian	10.74	6.75	6.22	5.50	5.88
B	Pertambangan	0.02	0.02	0.04	0.04	0.05
C	Industri Pengolahan	1.10	1.06	1.15	1.21	1.26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.18	0.05	0.06	0.06	0.07
E	Pengadaan Air	0.09	0.10	0.10	0.11	0.12
F	Konstruksi	21.25	50.41	10.96	10.88	21.53
G	Perdagangan	2.87	3.08	2.95	3.31	3.77
H	Transportasi dan Pergudangan	5.17	5.33	3.50	4.04	1.82
I	Akomodasi dan MaMin	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00
J	Infokom	4.94	5.20	5.38	5.92	6.15
K	Jasa Keuangan	0.25	0.23	0.20	0.22	0.24
L	Real Estate	1.48	1.45	1.44	1.50	1.63
M,N	Jasa Perusahaan	0.22	0.73	1.91	4.18	1.56
O	Administrasi Pemerintahan	3.99	3.79	4.01	4.21	3.02
P	Jasa Pendidikan	0.88	0.92	1.02	1.04	1.06
Q	Jasa Kesehatan	1.04	1.35	1.43	1.59	1.69
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.60	0.63	0.62	0.64	0.68
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		54.84	81.12	41.01	44.47	50.52

Sumber: Diolah dari data primer

